

# RANCANGAN AKHIR

## RENCANA KERJA

### 2022



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang bersih, adil dan melayani yang bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi, guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata, maka Pemerintah Aceh melalui setiap Organisasi Perangkat Aceh secara konsisten dan optimal meningkatkan kinerja melalui tugas dan fungsi masing-masing. Dengan kondisi ini diharapkan kehadiran Pemerintah lebih berhasil guna, berdaya guna dan bertanggungjawab bagi masyarakat Aceh. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan khususnya pada aspek pelayanan umum di bidang urusan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala seperti adanya keterbatasan sumber daya aparatur dan minimnya sarana yang dimiliki sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut, konsep pembangunan perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung oleh sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan di semua sektor.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran serta sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (RKA-BPKA) Tahun Anggaran 2022. Dokumen Renja ini juga sebagai jawaban dalam mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab tuntutan dinamika pengelolaan keuangan yang semakin kompleks. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi semuanya baik institusi Pemerintah maupun swasta serta semua pihak yang membutuhkannya.

Banda Aceh, 2021  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

**AZHARI, SE, M.Si**  
NIP. 19630325 198903 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BABI II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPA TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPA .....	12
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPA .....	27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPA.....	44
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA.....	50
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	58
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPA</b>	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	60
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPA.....	65
3.3. Program dan Kegiatan.....	66
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>71</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Aceh Pada Badan Pengelolaan keuangan Aceh. Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan penggabungan dari 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Keuangan Aceh dan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh.

Menurut Qanun tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan unsur pendukung Pemerintah Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Secara umum tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah dan organisasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Karena itu, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai peranan yang vital dalam mendukung peran strategik Pemerintah Aceh untuk mewujudkan visi dan misinya.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana pembangunan satuan kerja perangkat aceh, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Aceh (Renja-OPA) adalah Dokumen Perencanaan OPA untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2022. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap OPA untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPA sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja OPA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Berkenaan dengan tugas dan fungsinya sebagai OPA, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai peran yang amat strategis dalam menyiapkan bahan-bahan

pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2022 dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja OPA mempunyai kedudukan yang strategis yaitu dokumen yang menjembatani antara perencanaan Organisasi Perangkat Aceh dengan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), sebagai wujud implementasi dari Renstra OPA dan RPJMA dalam satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja merupakan acuan Organisasi Perangkat Aceh untuk menyusun program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang selanjutnya perencanaan program dan kegiatan dimaksud akan dijabarkan lebih lanjut dalam RKA-OPA.

Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial sebagai penerjemah dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Aceh yang ditetapkan dalam Rencana Strategis instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh. Rencana Kerja juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis telah tercapai

Dokumen Renja OPA pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis dalam menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Aceh. Kualitas dokumen renja sangat ditentukan oleh kemampuan Organisasi Perangkat Aceh dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Aceh.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPA dan Renja OPA, orientasi mengenai RKPA dan Renja OPA, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Aceh merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPA yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPA. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPA dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal

RKPA, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Organisasi Perangkat Aceh, evaluasi pelaksanaan Renja OPA tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja tahapan pencapaian Renstra OPA. BAPPEDA mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja guna penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Aceh dalam rangka sinergitas pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Aceh, penajaman indikator, target kinerja, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Aceh. Tahap penyusunan rancangan akhir Renja OPA dilakukan dengan pengesahan Kepala Organisasi Perangkat Aceh untuk menetapkan Renja OPA menjadi pedoman di lingkungan Organisasi Perangkat Aceh dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Aceh pada tahun anggaran berkenaan.

Sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Aceh, Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Aceh maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Salah satu tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah mensukseskan visi Gubernur Aceh yaitu **‘Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani dengan pengertian tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata’**.

Sedangkan dari misi-misi yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh ditugaskan untuk mendukung dan mensukseskan misi ke 1 yakni ***Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani*** dengan program unggulannya ***Aceh Peumulia***.



Tujuan atau Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan-tujuan besar (*strategic goals*) sebagai pedoman dan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan serta program. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan OPA dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPA. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPA sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pagu Indikatif merupakan pagu anggaran yang diberikan kepada OPA untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja OPA. Pagu prakiraan maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Renja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Renja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan

formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program kegiatan. Untuk itu dipandang perlu Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menyusun dokumen Renja untuk mewujudkan formulasi perencanaan pengelolaan keuangan yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh didasarkan pada ketentuan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Aceh Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi BPKA dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, dan memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan Tahun Anggaran 2022 serta untuk dapat mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPA serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2022 adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat menunjang visi dan misi Gubernur Aceh.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2022 ini diantaranya adalah:

- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar program dan bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar kegiatan di masing-masing bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
- Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBA;
- Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja OPA adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan program kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2022 serta untuk mengukur kinerja sasaran dari masing-masing kegiatan dan juga sebagai

dokumen untuk sarana perencanaan dan pengendalian program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh BPKA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Agar lebih mudah dalam memahami Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tahun 2022, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT ACEH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT ACEH

BAB V PENUTUP

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Tercapai tidaknya pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sejak dibentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yaitu Tahun 2017.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Aceh Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang mulai berlaku pada tahun 2018. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun terus dilakukan seiring dilakukannya revisi terhadap Rencana Strategis.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain dari pada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian yang direncanakan, dan implikasi dari Program Renstra BPKA adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah BPKA berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada pembangunan daerah pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai dengan Renstra, maka BPKA akan terus mengupayakan kedepan untuk terus meningkatkan kinerjanya, sehingga target target yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat terealisasi dengan baik.

Tindakan/kebijakan Perencanaan dan Penganggaran dalam mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau melebihinya target kinerja dari program/kegiatan yang diambil, yaitu:

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada semua yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, dan



- b. Perlu ditingkatkannya koordinasi kepada stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2022 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Renstra BPKA. Keberhasilan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan.

# RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

TABEL 2.1  
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKA DAN PENCAPAIAN RENSTRA BPKA S.D TAHUN 2021  
PEMERINTAH ACEH

SKPA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2021	
					Target Renja SKPA Tahun 2020	Realisasi Renja SKPA Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Wajib									
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH (Non Urusan)		-							
03	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	-	100%	100%	82%	82%	-	-	-
03	01 01 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi perkantoran	-	100%	1 tahun	1 tahun	100%	-	-
03	01 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Pelayanan administrasi kantor	-	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	-	-
03	01 01 006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terjaganya kendaraan dinas, terlaksananya tugas-tugas perkantoran	-	78 Unit	184 Unit	158 Unit	100%	-	-
03	01 01 008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan kantor badan dan gudang arsip	-	7 Bidang dan Gudang	7 Bidang	7 Bidang	100%	-	-
03	01 01 010	Penyediaan Alat tulis Kantor	Terlaksananya Administrtasi Perkatoran	-	1.650 Rim Kertas, 657 Kotak Kertas Continuous Form, 2.060 Map, dll	1690 Rim Kertas, 657 Kotak Kertas Continuous Form, 2075 Map, 626 toner, 3 harddisk	1500 Rim Kertas, 471 Kotak Kertas Continuous Form, 1500 Map, 1500 toner, 3 harddisk	95%	-	-
03	01 01 011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kantor	-	8 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	-	-
03	01 01 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Kelistrikan gedung kantor	-	3 gedung	6 gedung	6 gedung	100%	-	-
03	01 01 013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan kantor untuk penunjang administrasi	-	34 Jenis	41 Jenis	73 Jenis	100%	-	-
03	01 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya keperluan bahan bacaan harian dan peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah	-	1 tahun	1 tahun	-	-	-	-
03	01 01 017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	-	Makan Rapat, Tamu dan Pengamanan	1 tahun	1 tahun	100%	-	-
03	01 01 018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya tugas-tugas dinas	-	Luar Aceh	1 tahun	9 bulan	75%	-	-
03	01 01 022	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kantor	-	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	-	-
03	01 01 032	Penatausahaan Aset	Jumlah Aset yang keluar dari pencatatan KIP BPKA	-	-	750 Unit Barang	-	-	-	-

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

			02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	100%	100%	77%	77%	-	-	-	
03		01	02	002	Pembangunan Rumah Dinas	Tersedianya Rumah Dinas bagi aparatur yang bertugas di UPTD	-	2 rumah	6 rumah	4 rumah	100%	-	-	-
03		01	02	003	Pembangunan Gedung Kantor	Adanya dokumen perencanaan dan gedung kantor dan tersedianya tanah untuk pembangunan UPTD dan SAMSAT	-	10DED, 2 gedung, 1 Pagat	39 DED, 23 gedung, 24 bangunan lainnya	4 DED, 12 gedung, 3 bangunan lainnya	65%	-	-	-
03		01	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya tugas-tugas kedinasan	-	50 Unit	8 Unit	7 Unit	88%	-	-	-
03		01	02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Terciptanya Pelaksanaan Kegiatan, terciptanya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	-	kursi 151, kursi sofa, 4, filling cabinet 5, rak 3, gordes, tempat tidur 10, meja 10, racun api 5, access doorlock 1	100%	98,47%	98%	-	-	-
03		01	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terselenggaranya pelayanan prima	-	37 Unit	100%	88,31%	88%	-	-	-
03		01	02	013	Pengadaan Komputer	Tersedianya dan Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan kantor Sebagai Pendukung Operasional Kantor	-	2 jenis	2 Komp virtualisasi 2 ipad 157 Komputer	5 komp virtualisasi, 2 ipad, 122 komputer	82%	-	-	-
03		01	02	021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Rumah dinas yang layak huni	-	2 unit	100%	15%	15%	-	-	-
03		01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelancaran dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas kantor	-	3 gedung	3 gedung	3 gedung	100%	-	-	-
03		01	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kelancaran dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas kantor	-	karpas, jaringan, gedung kantor (Fumigasi), tabung pemadam, lift serta meubelair	100%	89%	89%	-	-	-
03		01	02	030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan kedinasan	-	558 unit , 2 paket	100%	79%	79%	-	-	-
03		01	02	041	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Rumah huni yang layak huni	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
03		01	02	042	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terjaganya gedung kantor	-	rehab gedung, aula dan papan nama	18 bangunan, 4 penimbunan	20 bangunan, 3 penimbunan	100%	-	-	-
03		01	02	047	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sistem/Jaringan IT	Kelancaran dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas kantor	-	Jaringan SIPKD, UPTD dan SIKD	1 tahun	-	-	-	-	-
			03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
03		01	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terwujudnya keseragaman pemakaian seragam dinas	-	353 Pasang	383 Pasang	423 Pasang	100%	-	-	-
03		01	03	004	Pengadaan Pakaian KORPRI	Terwujudnya keseragaman pemakaian seragam dinas	-	2 jenis	-	-	-	-	-	-
03		01	03	005	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Terwujudnya keseragaman pemakaian seragam dinas	-	1 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	-	-	-

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

			05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Aparatur Yang Memenuhi Kompetensi	-	100%	100%	9%	9%	-	-
03		01	05	001 Pendidikan dan pelatihan formal	SDM yang Handal	-	189 orang	348 orang	30 orang	9%	-	-
			06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (lakip, renja, laporan keuangan, laporan realisasi, dll di bagi dengan total laporan wajib)	-	100%	100%	100%	100%	-	-
03		01	06	002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya laporan keuangan	-	2 Jenis Laporan	2 jenis laporan	2 Jenis Laporan	100%	-	-
03		01	06	003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Adanya pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan	-	96 kegiatan	94 kegiatan	97 kegiatan	100%	-	-
03		01	06	004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahunan	Tersedianya laporan kinerja Keuangan tahunan	-	5 Jenis Laporan	5 jenis laporan	5 Jenis Laporan	100%	-	-
03		01	06	005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja	Tersedianya pedoman pelaksanaan program dan kegiatan baik yang bersifat tahunan maupun lima tahunan serta tersedianya ukuran dari capaian dari pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan	-	96 kegiatan	10 dokumen	10 dokumen	100%	-	-
			15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	-	WTP Laporan Keuangan	WTP Laporan Keuangan	WTP Laporan Keuangan	WTP Laporan Keuangan	-	-
03		01	15	001 Penyusunan analisa standar belanja	tersusunnya jumlah dokumen pergub analisa standar belanja pemerintah Aceh	-	13 kegiatan	49 skpa	49 skpa	100%	-	-
03		01	15	003 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	tersedianya pergub standar pedoman dalam penyusunan keuangan daerah jumlah, target tahunan disesuaikan	-	1 Peraturan Gubernur	-	-	-	-	-
03		01	15	006 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Tersusunnya jumlah Qanun/Pergub tentang APBA	-	1 dokumen RanQanun tentang APBA 2020	49 skpa	49 skpa	100%	-	-
03		01	15	007 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya jumlah Pergub tentang penjabaran APBA dan tersusunnya Pergub tentang Perubahan Pergub tentang Penjabaran APBA (Revisi)	-	1 dokumen RanPerGub Aceh tentang Penjabaran APBA 2020	49 skpa	49 skpa	100%	-	-
03		01	15	008 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Tersusunnya jumlah Qanun/pergub tentang perubahan APBA	-	1 dokumen RanQanun tentang Perubahan APBA 2020	49 skpa	49 skpa	100%	-	-
03		01	15	009 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya jumlah Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBA	-	1 dokumen RanPerGub tentang Penjabaran Perubahan APBA 2020	49 skpa	49 skpa	100%	-	-
03		01	15	010 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	qanun laporan pertanggung jawaban anggaran (target disesuaikan berdasarkan tahunan)	-	7 jenis laporan	7 Jenis Laporan	7 Jenis Laporan	100%	-	-
03		01	15	011 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	pergub tentang penjabaran pertanggung jawaban)	-	1 Peraturan Gubernur	1 Peraturan Gubernur	1 Peraturan Gubernur	100%	-	-
03		01	15	014 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersosialisasinya regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	-	13 Kegiatan	5 Kegiatan	3 Kegiatan	60%	-	-

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

03	01	15	017	Peningkatan manajemen investasi daerah	Tersusunnya jumlah Pergub Rencana Kerja Investasi dan Dokumen Analisis terhadap Rencana Investasi Pemerintah Aceh	-	-	1 Dokumen Ranpergub	1 Dokumen Ranpergub	100%	-	-	-
03	01	15	050	Peningkatan Pelayanan Tata Usaha Keuangan Daerah	Jumlah laporan ketatausahaan	-	7 Bidang dan 23 UPTD	7 Bidang dan UPTD	7 Bidang dan UPTD	100%	-	-	-
03	01	15	053	Peningkatan Penataan Arsip Keuangan Daerah	jumlah dokumen arsip yang diterbitkan	-	Kantor Induk dan UPTD Samsat	1 tahun	1 tahun	100%	-	-	-
03	01	15	062	Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi dan Modul	-	1 Aplikasi yang terdiri dari 3 modul	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	-	-	-
03	01	15	063	Monitoring dan Evaluasi belanja bantuan keuangan	jumlah laporan hasil bantuan keuangan kab/kota yang termonitoring	-	5 Jenis Laporan	5 Jenis Laporan	5 Jenis Laporan	100%	-	-	-
03	01	15	070	Penyusunan dan penilaian pelaksanaan BLUD	Tersusunnya jumlah Pergub/Kepgub tentang OPA/unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD	-	3 BLUD	7 BLUD	14 BLUD	100%	-	-	-
03	01	15	088	Penyusunan Standar Biaya Umum Pemerintah Aceh	Tersusunnya jumlah Pergub tentang Standar Biaya Umum untuk Penyusunan RKA-SKPA	-	2 dokumen SBU Pemerintah Aceh	49 skpa	49 skpa	100%	-	-	-
03	01	15	089	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	Tersusunnya jumlah Dokumen KUA dan PPAS serta Dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBA	-	2 Dokumen KUA dan 2 Dokumen PPAS	49 skpa	49 skpa	100%	-	-	-
03	01	15	090	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kab/Kota	jumlah dokumen hasil evaluasi APBK kab/kota	-	43 Kepgub	46 KepGub	45 Kepgub	100%	-	-	-
03	01	15	091	Rakor Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota	jumlah rakor tentang evaluasi pedoman pengelolaan keuangan daerah	-	95 Org	95 orang	95 Org	100%	-	-	-
03	01	15	092	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah laporan pertanggungjawaban APBK yang dievaluasi	-	23 Kepgub	23 KepGub	23 Kepgub	100%	-	-	-
03	01	15	093	Bimtek Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	jumlah bimtek yang dilaksanakan mengenai penyusunan APBK dan pertanggung jawaban APBK	-	470 Org	-	-	-	-	-	-
03	01	15	094	Pengembangan Regional SIKD	jumlah dokumen digital APBD kab/kota yang tersedia pada sistem SIKD	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
03	01	15	095	Pengurusan Administrasi Belanja Daerah	jumlah dokumen SP2D / penerbitan SP2D	-	Penerbitan SPD dan SP2D yang cepat, tepat dan Akurat SPD dan SP2D	30 SP2D, 300 SPD, 250 REGISTER SP2D	16.393 SP2D, 250 SPD, 218 REGISTER SP2D	100%	-	-	-
03	01	15	096	Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas	jumlah laporan validasi dan entri data	-	BKU, Laporan Bulanan/triulanan/semester/tahunan/ penerimaan dana transfer dan belanja daerah Laporan	250 BKU, 12 Posisi Kas, 12 Ringkasan Realisasi, 12 Realisasi APBA, 4 LKT, 1 LRT, 250 Rekonsiliasi Kas	152 BKU, 12 Posisi Kas, 12 Ringkasan Realisasi, 12 Realisasi APBA, 4 LKT, 0 LRT, 252 Rekonsiliasi Kas	100%	-	-	-
03	01	15	097	Pengelolaan Administrasi GAJI PNSD dan Belanja Tidak Langsung	dokumen administrasi penggajian PNSD	-	Penerbitan SP2D Gaji, SKPP dan Rekapitulasi potongan pajak/Zis SP2D Gaji, SKPP dan rekapitulasi potongan pajak/Zis	1000 SP2D Gaji, 800 SKPP, 12 Rekapitulasi Pajak, 3 Potongan Pihak Ketiga, 4 Potongan FPK, 12 Potongan Taperum	1178 SP2D Gaji, 880 SKPP, 12 Rekapitulasi Pajak, 1 Potongan Pihak Ketiga, 4 Potongan FPK, 12 Potongan Taperum	100%	-	-	-
03	01	15	098	Pembinaan Perbendaharaan	jumlah bendahara yang bersertifikat bendahara	-	102 orang	150 orang	150 orang	100%	-	-	-
03	01	15	099	Koordinasi, Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan	jumlah laporan rekonsiliasi dan konsolidasi	-	46 SKPA	360 Laporan	360 Laporan	92%	-	-	-

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

			24	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rasio nilai barang milik daerah yang clear & clean per total barang milik daerah	-	74,13%	60%	75%	75%		-	-
03	01	24	001	Penatausahaan Aset	Jumlah laporan data BMA yang akuntabel	-	47 SKPA , 228 buku , 4 buku, 1 tahun anggaran	2 Laporan BMA, 47 buku inventaris SKPA, 1 tahun anggaran, 2 berita acara, 1 Tahun Anggaran	4 Laporan BMA, 48 buku inventaris SKPA, 1 tahun anggaran, 4 berita acara, 1 Tahun Anggaran	100%	-	-	-
03	01	24	003	Peningkatan Manajemen Aset	Jumlah laporan pengelolaan BMA	-	1 kali BIMTEK	1 Tahun, 1 KepGub BMA	1 Tahun, 1 KepGub BMA	100%	-	-	-
03	01	24	004	Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMMD).	Pergub RKBMA	-	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	-	-	-	-	-
03	01	24	005	Penghapusan Aset	Jumlah laporan aset yang dikeluarkan dari pencatatan Barang Milik Aceh	-	3 kali	4286 Unit Barang	4286 Unit Barang	100%	-	-	-
03	01	24	006	Pemindahtanganan Aset	Jumlah laporan legalitas perpindahtanganan aset	-	35 kali kegiatan	4286 Unit Barang	4286 Unit Barang	100%	-	-	-
03	01	24	007	Pengamanan Aset	Jumlah sertifikat kepemilikan BMA	-	10 Sertifikat, 15 Plang Papan Nama, 4 Asrama	10 Sertifikat, 8 PBB Asrama	12 Sertifikat, 8 PBB Asrama	100%	-	-	-
03	01	24	008	Pemanfatan Aset	Jumlah laporan BMA yang dilakukan pemanfaatan	-	3 kegiatan	1 kegiatan	4 kegiatan	100%	-	-	-
03	01	24	009	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang	Kepgub standar satuan harga barang dan jasa dan standar satuan harga barang bangunan dan jasa	-	2 Keputusan Gubernur tapi disatukan dalam 1 Keppub	2 Keputusan Gubernur	-	-	-	-	-
			25	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN ACEH	Persentase Pendapatan Asli Aceh Terhadap Total Pendapatan Aceh	-		Persentase PAA 16,51% dari pendapatan				-	-
03	01	25	001	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Aceh	Jumlah peningkatan pendapatan asli aceh	-	2,25 Triliun	2,18 Triliun	1,90 Triliun	93,70%	-	-	-
03	01	25	002	Koordinasi dan sinkronisasi penerimaan dana desentralisasi	Tersedianya data dan laporan penerimaan dana desentralisasi	-	3 (sumber dana)	-	-	-	-	-	-
03	01	25	003	Baliho himbauan pajak dalam rangka peningkatan pendapatan daerah	tersampaikan himbauan pajak di 23 kabupaten/kota	-	90%	-	-	-	-	-	-
03	01	25	004	Pemeliharaan basis data objek pajak dan subjek pajak	database potensi objek dan subjek pajak kendaraan bermotor	-	864501 Unit Kendaraan	1 Laporan	880536 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	005	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamsatan UPTD I Banda Aceh	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD I Banda Aceh	-	211863 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	-
03	01	25	006	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamsatan UPTD II Aceh Besar	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD II Aceh Besar	-	57273 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	-
03	01	25	007	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamsatan UPTD III Pidie	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD III Pidie	-	65023 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	-
03	01	25	008	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamsatan UPTD IV Bireuen	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD IV Bireuen	-	72779 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	-
03	01	25	009	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamsatan UPTD V Lhokseumawe	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD V Lhokseumawe	-	52403 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	-
03	01	25	010	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamsatan UPTD VI Aceh Utara	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD VI Aceh Utara	-	78033 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	-
03	01	25	011	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamsatan UPTD VII Aceh Timur	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD VII Aceh Timur	-	46707 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	-

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

03	01	25	012	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD VIII Langsa	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD VIII Langsa	-	34027 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-
03	01	25	013	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD IX Aceh Tamiang	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD IX Aceh Tamiang	-	46159 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-
03	01	25	014	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD X Bener Meriah	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD X Bener Meriah	-	21282 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-
03	01	25	015	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD XI Aceh Tengah	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XI Aceh Tengah	-	31808 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-
03	01	25	016	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD XII Gayo Lues	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XII Gayo Lues	-	7324 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-
03	01	25	017	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD XIII Aceh Tenggara	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XIII Aceh Tenggara	-	11931 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-
03	01	25	018	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD XIV Aceh Jaya	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XIV Aceh Jaya	-	9307 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-
03	01	25	019	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD XV Aceh Barat	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XV Aceh Barat	-	33215 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-
03	01	25	020	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD XVI Nagan Raya	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XVI Nagan Raya	-	19610 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-
03	01	25	021	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD XVII Aceh Barat Daya	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XVII Aceh Barat Daya	-	16941 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-
03	01	25	022	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD XVIII Aceh Selatan	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XVIII Aceh Selatan	-	22409 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-
03	01	25	023	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD XIX Aceh Singkil	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XIX Aceh Singkil	-	9207 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-
03	01	25	024	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD XX Sabang	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XX Sabang	-	9359 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-
03	01	25	025	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD XXI Simeulue	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XXI Simeulue	-	5161 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-
03	01	25	026	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD XXII Pidie Jaya	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XXII Pidie Jaya	-	19109 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-
03	01	25	027	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD XXIII Subulussalam	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XXIII Subulussalam	-	5534 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-
03	01	25	028	Penyelenggaraan Rutinitas dan Pengelolaan Teknologi Infomasi (P2TI)	Teknis	Terwujudnya pengelolaan keuangan berbasis tekhnologi informasi	-	1 aplikasi	1 aplikasi	-	-	-	-

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

03	01	25	029	Penyelarasan dan Pelaporan Penerimaan Data Desentralisasi	Laporan Penerimaan dana desentralisasi	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	-	-	-
03	01	25	030	Sosialisasi Kebijakan Pajak dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah	Jumlah sosialisasi pajak Aceh yang dilaksanakan	-	-	50%	50%	100%	-	-	-
03	01	25	031	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD I Banda Aceh	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD I Banda Aceh	-	-	188361 Unit Kendaraan	156974 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	032	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD II Aceh Besar	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD II Aceh Besar	-	-	75032 Unit Kendaraan	115306 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	033	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD III Pidie	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD III Pidie	-	-	80351 Unit Kendaraan	84711 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	034	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD IV Bireuen	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD IV Bireuen	-	-	49719 Unit Kendaraan	99318 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	035	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD V Lhokseumawe	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD V Lhokseumawe	-	-	63434 Unit Kendaraan	56445 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	036	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD VI Aceh Utara	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD VI Aceh Utara	-	-	75314 Unit Kendaraan	99824 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	037	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD VII Aceh Timur	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD VII Aceh Timur	-	-	37789 Unit Kendaraan	60363 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	038	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD VIII Langsa	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD VIII Langsa	-	-	35776 Unit Kendaraan	40725 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	039	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD IX Aceh Tamiang	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD IX Aceh Tamiang	-	-	46053 Unit Kendaraan	54999 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	040	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD X Bener Meriah	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD X Bener Meriah	-	-	21066 Unit Kendaraan	24277 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	041	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XI Aceh Tengah	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XI Aceh Tengah	-	-	37588 Unit Kendaraan	37461 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	042	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XII Aceh Barat	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XII Aceh Barat	-	-	44073 Unit Kendaraan	47717 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	043	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XIII Nagan Raya	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XIII Nagan Raya	-	-	26793 Unit Kendaraan	33252 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	044	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XIV Aceh Barat Daya	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XIV Aceh Barat Daya	-	-	22277 Unit Kendaraan	22631 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	045	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XV Aceh Selatan	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XV Aceh Selatan	-	-	23423 Unit Kendaraan	34743 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	046	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XVI Pidie Jaya	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XVI Pidie Jaya	-	-	21090 Unit Kendaraan	24375 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	047	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XVII Sabang	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XVII Sabang	-	-	2356 Unit Kendaraan	11257 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	048	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XVIII Aceh Jaya	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XVIII Aceh Jaya	-	-	15378 Unit Kendaraan	15330 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	049	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XIX Subulussalam	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XIX Subulussalam	-	-	7372 Unit Kendaraan	9280 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	050	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XX Aceh Singkil	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XX Aceh Singkil	-	-	16685 Unit Kendaraan	15565 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	051	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XXI Gayo Lues	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XXI Gayo Lues	-	-	5807 Unit Kendaraan	9700 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	052	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XXII Aceh Tenggara	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XXII Aceh Tenggara	-	-	11862 Unit Kendaraan	15589 Unit Kendaraan	100%	-	-	-
03	01	25	053	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XXIII Simelue	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XXIII Simelue	-	-	5696 Unit Kendaraan	6997 Unit Kendaraan	100%	-	-	-



## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

5					UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN	URUSAN									-	-
5	02				KEUANGAN										-	-
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	URUSAN	PERSENTASE LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN YANG TERSUSUN TEPAT WAKTU (LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI, DLL DIBAGI DENGAN TOTAL LAPORAN WAJIB	100%					100%		-	-
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100%					100%		-	-
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, RTP, LAKIP	10 Dokumen	-	-	-	-	10 Dokumen		4 Dokumen	-
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Tersusunnya Dokumen RKA, DPA, RKA/DPA-P	10 Dokumen	-	-	-	-	10 Dokumen		1 Dokumen	-
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100%					100%		-	-
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	24 Dokumen	-	-	-	-	24 Dokumen		6 Dokumen	-
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersusunnya Laporan Keuangan SKPA	5 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen		2 Dokumen	-
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPA	5 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen		-	-
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					100%			
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Tersedianya Tertib Aset SKPA	1Tahun	-	-	-	-	1Tahun		6 bulan	-
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100%					100%			
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Terpenuhiya Seragam Dinas bagi Aparatur Terpenuhiya Seragam Dinas bagi Aparatur	400 PNS dan 400 NON PNS	-	-	-	-	400 PNS dan 400 NON PNS		-	-
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terpenuhiya Bimtek bagi Aparatur	348 Orang	-	-	-	-	348 Orang		1 orang	-

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022**

5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					100%		
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Listrik	1Tahun	-	-	-	-	1Tahun	6 bulan	-
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor BPKA	1 Gedung	-	-	-	-	1 Gedung	-	-
						tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Samsat	23 UPTD	-	-	-	-	23 UPTD	-	-
						tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah dinas	6 UPTD	-	-	-	-	6 UPTD	-	-
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya ATK, Makan minum, Alat Kebersihan	1 Tahun dan 7 Bidang	-	-	-	1 Tahun dan 7 Bidang	1 Gudang dan 2 Gedung Kantor	-	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya bahan Cetak kedinasan	7 Bidang 23 UPTD	-	-	-	7 Bidang 23 UPTD	7 Bidang 23 UPTD	-	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Buku Bacaan	1 Tahun	-	-	-	1 Tahun	-	-	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Perjalanan Dinas	1 Tahun	-	-	-	1 Tahun	6 bulan	-	
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kearsipan Dinas menjadi tertib dan teratur	1 Tahun	-	-	-	1 Tahun	-	-	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					100%		
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kendaraan untuk Operasional Kedinasan	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	-	-
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Samsat, Rumah Dinas, Gedung Arsip Samsat	12 UPTD	-	-	-	-	12 UPTD	-	-
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					100%		
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Surat Kedinasan	1 Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	6 bulan	-
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan PDAM, Listrik, Telpon	1 Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	6 bulan	-
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Perlengkapan	1 Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	6 bulan	-
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gaji Non ASN kantor induk dan UPTD	23 UPTD	-	-	-	-	23 UPTD	23 UPTD	-

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022**

5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					100%		
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terjaganya kendaraan dinas, terlaksananya tugas-tugas perkantoran	250 Kendaraan	-	-	-	-	250 Kendaraan	-	-
							1 Tahun					1 Tahun		
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan gedung UPTD, dan Rumah Dinas	1 Gudang	-	-	-	-	1 Gudang	-	-
							2 Gedung Induk					2 Gedung Induk		
							23 UPTD					23 UPTD		
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	WTP WTP/WDP					WTP WTP/WDP	-	-
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	WTP WTP/WDP					WTP WTP/WDP	-	-
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA PPAS-P	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA/DPA SKPA	50 DPA & 50 DPPA	-	-	-	-	50 DPA & 50 DPPA	-	-
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Dokumen Qanun APBA dan Penjabaran APBA	1 Pergub 1 Qanun	-	-	-	-	1 Pergub 1 Qanun	1 Pergub 1 Qanun	-
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Dokumen Qanun APBA-P dan Penjabaran APBA-P	1 Qanun 2 Pergub	-	-	-	-	1 Qanun 2 Pergub	-	-
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Dokumen Aturan terkait SBU, ASB, RKI, SE Penyusunan APBA	1 RanQanun	-	-	-	-	1 RanQanun	-	-
							2 KepGub, 2 SE Gubernur, 3 PerGub					2 KepGub, 2 SE Gubernur, 3 PerGub		
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	WTP WTP/WDP					WTP WTP/WDP	-	-
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen hasil evaluasi gubernur penetapan APBK	23 kepgub	-	-	-	-	23 kepgub	1 Pergub 1 Qanun	-
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen dokumen hasil evaluasi gubernur penetapan perubahan APBK	23 kepgub	-	-	-	-	23 kepgub	-	-
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen dokumen hasil evaluasi gubernur penetapan Pertanggungjawaban APBK	23 kepgub	-	-	-	-	23 kepgub	-	-
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Asistensi ke Kab/kota	95 orang	-	-	-	-	95 orang	-	-
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Sosialisasi utk Kab/Kota	270 orang	-	-	-	-	270 orang	-	-

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022**

5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	WTP WTP/WDP					WTP WTP/WDP	-	-
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Penyelesaian Administrasi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah	4 Jenis Laporan, 1800 SP2D dan SKPP	-	-	-	-	4 Jenis Laporan, 1800 SP2D dan SKPP	100 SK Rekonsiliasi	-
						Terselesaikannya Administrasi Belanja Daerah	250 Register SP2D dan 40000 SP2D				250 Register SP2D dan 40000 SP2D	62 Register Sp2D		
						Terselesaikannya Administrasi Pengelolaan Kas Daerah	1 SK dan 250 Rekonsiliasi				1 SK dan 250 Rekonsiliasi	190 Register Sp2D, 1 jenis laporan sp2d dan skpp		
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terselesaikannya Administrasi Pendapatan dan Belanja Daerah	4 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	-	-
						Tersusunnya Laporan Penerimaan Dana Desentralisasi	6 Jenis Laporan				6 Jenis Laporan			
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	250 BKU	-	-	-	-	250 BKU	1 BKU	-
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Terselesaikannya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan, Bendahara yang memiliki Sertifikat Bendahara, Peningkatan Pemahaman tentang Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	3 Draft Pergub/ SE Gub dan 80 Draft SK PA/KPA	-	-	-	-	3 Draft Pergub/ SE Gub dan 80 Draft SK PA/KPA	-	-
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	WTP WTP/WDP					WTP WTP/WDP	-	-
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA (LRA, Neraca, Arus Kas, LO, LPE, LPSAL dan CaLK)	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	-
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Akuntabel	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh	1 Buku	-	-	-	-	1 Buku	-	-
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja	5 Kegiatan	-	-	-	-	5 Kegiatan	1 Kegiatan	-
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	WTP WTP/WDP					WTP WTP/WDP	-	-
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya kegiatan untuk pengembangan sarana dan prasarana serta tersalurnya bantuan keuangan khusus	3 Jenis Laporan	-	-	-	-	3 Jenis Laporan	3 Jenis Laporan	-

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022**

5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rasio nilai barang milik daerah yang clear & clean per total barang milik daerah	80%					80%	-	-
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rasio nilai barang milik daerah yang clear & clean per total barang milik daerah	80%					80%	-	-
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Daftar Standar Satuan Harga	1 kepgub	-	-	-	-	1 kepgub	-	-
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Daftar Hasil telaahan dan pembahasan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 kepgub	-	-	-	-	1 kepgub	-	-
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Peningkatan kualitas SDM	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	-	-
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya bukti kepemilikan BMA	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	-	-
						Tersedianya Tanda Kepemilikan Tanah	1 laporan					1 laporan		
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Tersusunnya daftar hasil revaluasi barang milik aceh	1 kepgub BMA 2 kegiatan	-	-	-	-	1 kepgub BMA 2 kegiatan	-	-
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Hibah, Penjualan, Tukar menukar dan Penyertaan Modal	7 SK	-	-	-	-	7 SK	-	-
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap total pendapatan Aceh	28%					28%	-	-
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap total pendapatan Aceh	28%					28%	-	-
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terpenuhinya jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	23 Kab/Kota	-	-	-	-	23 Kab/Kota	-	-
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Termutakhirnya basis data pajak dan retribusi Aceh	1200000 Basis Data	-	-	-	-	1200000 Basis Data	370.000 Basis Data	-
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Terwujudnya Pelayanan Samsat Yang Prima	860000 Wajib Pajak	-	-	-	-	860000 Wajib Pajak	370.000 Wajib Pajak	-
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	pelatihan dan rapat koordinasi	4 Kegiatan	-	-	-	-	4 Kegiatan	-	-

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran capaian kinerja BPKA tahun anggaran 2020 diukur berdasarkan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan tingkat outcome Pemerintah Daerah seperti yang terdapat dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, dengan capaian sebagai berikut:

No	INDIKATOR	CAPAIAN
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBA	30,58%
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	17,12%
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	12,55%
5	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Belanja Langsung = 67,77% Belanja Tidak Langsung = 87,12%
6	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	90,88%
7	Penetapan APBA	Tidak tepat waktu

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kerja Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2017-2022.

**Indikator Kinerja Utama 2017-2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/CARA PENGUKURAN	PENJELASAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase OPA Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah OPA yang menyampaikan laporan keuangan tahunan tepat waktu dengan jumlah keseluruhan OPA	Permendagri No. 13 Tahun 2006	Bidang Akuntansi

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

2	Meningkatnya Pendapatan Asli Aceh	Persentase peningkatan realisasi Pendapatan Asli Aceh dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Perolehan nilai jumlah realisasi Pendapatan Asli Aceh dibandingkan dengan Pendapatan Asli Aceh tahun lalu	PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	Bidang Pendapatan
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen APBK dan pertanggungjawaban APBK yang dievaluasi Tepat Waktu	Penetapan hasil evaluasi APBD dan pertanggungjawaban maksimal 15 hari kerja	Permendagri No. 13 Tahun 2006	Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan bidang Pendapatan, Anggaran, Barang dan Kekayaan Milik Aceh, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pembinaan serta Evaluasi Anggaran Kabupaten/kota sesuai Peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan;
- b. Pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang pendapatan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang anggaran;
- f. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang barang dan kekayaan milik Aceh;
- g. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang perbendaharaan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang akuntansi;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi anggaran kabupaten/kota;
- j. Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

- k. Pelaksanaan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
- l. Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- m. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusun petunjuk teknis tentang sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- n. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- o. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- p. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- q. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran;
- r. Pelaksanaan dan pengendalian sistem akuntansi dan pelaporan keuangan aceh;
- s. Pelaksanaan penyajian informasi keuangan Aceh;
- t. Pelaksanaan Penatausahaan Asset Aceh; dan
- u. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan Aceh.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKA sebagaimana tersebut diatas Kepala Badan diberikan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan;
- b. Pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan;
- d. Pengkoordinasian dan Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang pendapatan;



- e. Pengkoordinasian dan Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang Anggaran;
- f. Pengkoordinasian dan Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang barang dan kekayaan milik Aceh;
- g. Pengkoordinasian dan Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang Perbendaharaan;
- h. Pengkoordinasian dan Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang Akuntansi;
- i. Pengkoordinasian dan Pengendalian pelaksanaan Pembinaan dan evaluasi anggaran kabupaten/kota;
- j. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran;
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan asas umum pengelolaan keuangan aceh;
- l. Pengkoordinasian penyiapan dan rekomendasi terhadap pejabat-pejabat yang mengelola keuangan Aceh;
- m. Pengkoordinasian, pengendalian penyusunan dan penyiapan struktur APBA;
- n. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
- o. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
- p. Pengkoordinasian penyusunan dan penyiapan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- q. Pengkoordinasian penyusunan dan penyiapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- r. Pengkoordinasian pelaksanaan penatausahaan keuangan Aceh;

- s. Pengkoordinasian dan pengendalian pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- t. Pengkoordinasian dan pengendalian defisit dan penggunaan surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- u. Pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan Kas Umum Aceh;
- v. Pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan piutang, utang dan dana cadangan Aceh;
- w. Pembinaan, pengawasan dan pengaturan pengelolaan keuangan Aceh;
- x. Pengkoordinasian dan pengendalian penyelesaian kerugian Aceh;
- y. Pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- z. Pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
- aa. Pengendalian dan Pengkoordinasian perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- bb. Pengkoordinasian dan pengendalian pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik Aceh;
- cc. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- dd. Pengkoordinasian, pengendalian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- ee. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- ff. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugasnya.

Mewujudkan tugas dan fungsi tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 dengan menganalisa dan memperhatikan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tahun-tahun sebelumnya dalam rangka:

- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, maupun antara pusat dan daerah;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Informasi analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang disajikan adalah rekapitulasi hasil pelaksanaan dan program kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai gambaran/cerminan sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap pencapaian target-target yang telah ditentukan pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

# RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

TABEL 2.2  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA  
PROVINSI ACEH

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	-	-	100%	100%	-	-	100%	82%	-	-	-
1	Terlaksananya administrasi perkantoran	-	-	100%	1 tahun	-	-	100%	1 tahun	-	-	-
2	Terpenuhinya Pelayanan administrasi kantor	-	-	1 tahun	1 tahun	-	-	1 tahun	1 tahun	-	-	-
3	Terjaganya kendaraan dinas, terlaksananya tugas-tugas perkantoran	-	-	78 Unit	184 Unit	-	-	78 Unit	158 Unit	-	-	-
4	Kebersihan kantor badan dan gudang arsip	-	-	7 Bidang dan Gudang	7 Bidang	-	-	7 Bidang dan Gudang	7 Bidang	-	-	-
5	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	-	-	1.650 Rim Kertas, 657 Kotak Kertas Continous Form, 2.060 Map, dll	1690 Rim Kertas, 657 Kotak Kertas Continous Form, 2075 Map, 626 toner, 3 harddisk	-	-	1.650 Rim Kertas, 657 Kotak Kertas Continous Form, 2.060 Map, dll	1500 Rim Kertas, 471 Kotak Kertas Continous Form, 1500 Map, 1500 toner, 3 harddisk	-	-	-
6	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kantor	-	-	8 jenis	6 jenis	-	-	8 jenis	6 jenis	-	-	-
7	Terpenuhinya kebutuhan Kelistrikan gedung kantor	-	-	3 gedung	6 gedung	-	-	3 gedung	6 gedung	-	-	-
8	Terpenuhinya kebutuhan kantor untuk penunjang administrasi	-	-	34 Jenis	41 Jenis	-	-	34 Jenis	73 Jenis	-	-	-
9	tersedianya keperluan bahan bacaan harian dan peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah	-	-	1 tahun	1 tahun	-	-	1 tahun	-	-	-	-
10	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	-	-	Makan Rapat, Tamu dan Pengamanan	1 tahun	-	-	Makan Rapat, Tamu dan Pengamanan	1 tahun	-	-	-
11	Terlaksananya tugas-tugas dinas	-	-	Luar Aceh	1 tahun	-	-	Luar Aceh	9 bulan	-	-	-
12	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kantor	-	-	1 tahun	1 tahun	-	-	1 tahun	1 tahun	-	-	-
13	Jumlah Aset yang keluar dari pencatatan KIP BPKA	-	-	-	750 Unit Barang	-	-	-	-	-	-	-

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	100%	100%	-	-	100%	77%	-	-	-
1	Tersedianya Rumah Dinas bagi aparatur yang bertugas di UPTD	-	-	2 rumah	6 rumah	-	-	2 rumah	4 rumah	-	-	-
2	Adanya dokumen perencanaan dan gedung kantor dan tersedianya tanah untuk pembangunan UPTD dan SAMSAT	-	-	10DED, 2 gedung, 1 Pagar	39 DED, 23 gedung, 24 bangunan lainnya	-	-	10DED, 2 gedung, 1 Pagar	4 DED, 12 gedung, 3 bangunan lainnya	-	-	-
3	Terlaksananya tugas-tugas kedinasan	-	-	50 Unit	8 Unit	-	-	50 Unit	7 Unit	-	-	-
4	Terciptanya Pelaksanaan Kegiatan, terciptanya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	kursi 151, kursi sofa, 4, filling cabinet 5, rak 3, gordena, tempat tidur 10, meja 10, racun api 5, access doorlock 1	100%	-	-	kursi 151, kursi sofa, 4, filling cabinet 5, rak 3, gordena, tempat tidur 10, meja 10, racun api 5, access doorlock 1	98,47%	-	-	-
5	Terselenggaranya pelayanan prima	-	-	37 Unit	100%	-	-	37 Unit	88,31%	-	-	-
6	Tersedianya dan Terpenuhi Kebutuhan Peralatan kantor Sebagai Pendukung Operasional Kantor	-	-	2 jenis	2 Komp virtualisasi 2 ipad 157 Komputer	-	-	2 jenis	5 komp virtualisasi, 2 ipad, 122 komputer	-	-	-
7	Rumah dinas yang layak huni	-	-	2 unit	100%	-	-	2 unit	15%	-	-	-
8	Kelancaran dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas kantor	-	-	3 gedung	3 gedung	-	-	3 gedung	3 gedung	-	-	-
9	Kelancaran dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas kantor	-	-	karpas, jaringan, gedung kantor (Fumigasi), tabung pemadam, lift serta meubelair	100%	-	-	karpas, jaringan, gedung kantor (Fumigasi), tabung pemadam, lift serta meubelair	89%	-	-	-
10	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan kedinasan	-	-	558 unit, 2 paket	100%	-	-	558 unit, 2 paket	79%	-	-	-
11	Rumah huni yang layak huni	-	-	1 unit	100%	-	-	-	100%	-	-	-
12	Terjaganya gedung kantor	-	-	rehab gedung, aula dan papan nama	18 bangunan, 4 perimbuman	-	-	rehab gedung, aula dan papan nama	20 bangunan, 3 perimbuman	-	-	-
13	Kelancaran dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas kantor	-	-	Jaringan SIPKD, UPTD dan SIKD	1 tahun	-	-	Jaringan SIPKD, UPTD dan SIKD	-	-	-	-

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-
1	Terwujudnya keseragaman pemakaian seragam dinas	-	-	353 pasang	383 Pasang	-	-	353 pasang	423 Pasang	-	-	-
2	Terwujudnya keseragaman pemakaian seragam dinas	-	-	2 jenis	-	-	-	2 jenis	-	-	-	-
3	Terwujudnya keseragaman pemakaian seragam dinas	-	-	1 jenis	2 jenis	-	-	1 jenis	2 jenis	-	-	-
	Persentase Aparatur Yang Memenuhi Kompetensi	-	-	100%	100%	-	-	100%	9%	-	-	-
1	SDM yang Handal	-	-	189 orang	348 orang	-	-	189 orang	30 orang	-	-	-
	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (lkip, renja, laporan keuangan, laporan realisasi, dll di bagi dengan total laporan wajib)	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-
1	Tersedianya laporan keuangan	-	-	2 Jenis Laporan	2 jenis laporan	-	-	2 Jenis Laporan	2 Jenis Laporan	-	-	-
2	Adanya pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan	-	-	96 kegiatan	94 kegiatan	-	-	96 kegiatan	97 kegiatan	-	-	-
3	Tersedianya laporan kinerja Keuangan tahunan	-	-	5 Jenis Laporan	5 jenis laporan	-	-	5 Jenis Laporan	5 Jenis Laporan	-	-	-
4	Tersedianya pedoman pelaksanaan program dan kegiatan baik yang bersifat tahunan maupun lima tahunan serta tersedianya ukuran dari capaian dari pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan	-	-	96 kegiatan	10 dokumen	-	-	96 kegiatan	10 dokumen	-	-	-
	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	-	-	100%	WTP Laporan Keuangan	-	-	100%	WTP Laporan Keuangan	-	-	-
1	tersusunnya jumlah dokumen pergub analisa standar belanja pemerintah Aceh	-	-	10 kegiatan	49 skpa	-	-	13 kegiatan	49 skpa	-	-	-
2	tersedianya pergub standar pedoman dalam penyusunan keuangan daerah jumlah, target tahunan disesuaikan	-	-	4 Peraturan Gubernur	-	-	-	1 Peraturan Gubernur	-	-	-	-
3	Tersusunnya jumlah Qanun/Pergub tentang APBA	-	-	1 dokumen RanQanun tentang APBA 2020	49 skpa	-	-	1 dokumen RanQanun tentang APBA 2020	49 skpa	-	-	-
4	Tersusunnya jumlah Pergub tentang penjabaran APBA dan tersusunnya Pergub tentang Perubahan Pergub tentang Penjabaran APBA (Revisi)	-	-	1 dokumen RanPerGub Aceh tentang Penjabaran APBA 2020	49 skpa	-	-	1 dokumen RanPerGub Aceh tentang Penjabaran APBA 2020	49 skpa	-	-	-
5	Tersusunnya jumlah Qanun/pergub tentang perubahan APBA	-	-	1 dokumen RanQanun tentang Perubahan APBA 2020	49 skpa	-	-	1 dokumen RanQanun tentang Perubahan APBA 2020	49 skpa	-	-	-
6	Tersusunnya jumlah Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBA	-	-	1 dokumen RanPerGub tentang Penjabaran Perubahan APBA 2020	49 skpa	-	-	1 dokumen RanPerGub tentang Penjabaran Perubahan APBA 2020	49 skpa	-	-	-
7	qanun laporan pertanggung jawaban anggaran (target disesuaikan berdasarkan tahunan)	-	-	7 jenis laporan	7 Jenis Laporan	-	-	7 jenis laporan	7 Jenis Laporan	-	-	-
8	pergub tentang penjabaran pertanggung jawaban)	-	-	1 Peraturan Gubernur	1 Peraturan Gubernur	-	-	1 Peraturan Gubernur	1 Peraturan Gubernur	-	-	-

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

9	Tersosialisasinya regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	-	-	13 Kegiatan	5 Kegiatan	-	-	13 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	-
10	Tersusunnya jumlah Pergub Rencana Kerja Investasi dan Dokumen Analisis terhadap Rencana Investasi Pemerintah Aceh	-	-	1 dokumen RanPerGub Aceh tentang Rencana Investasi Pemerintah Aceh	1 Dokumen Ranpergub	-	-	-	1 Dokumen Ranpergub	-	-	-
11	Jumlah laporan ketatausahaan	-	-	7 Bidang dan UPTD	7 Bidang dan UPTD	-	-	7 Bidang dan 23 UPTD	7 Bidang dan UPTD	-	-	-
12	Tertib Administrasi Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	jumlah dokumen arsip yang ditertibkan	-	-	kantor induk dan UPTD	1 tahun	-	-	Kantor Induk dan UPTD Samsat	1 tahun	-	-	-
14	Jumlah Aplikasi dan Modul	-	-	1 Aplikasi yang terdiri dari 3 modul	1 Aplikasi	-	-	1 Aplikasi yang terdiri dari 3 modul	1 Aplikasi	-	-	-
15	jumlah laporan hasil bantuan keuangan kab/kota yang termonitoring	-	-	5 jenis laporan	5 Jenis Laporan	-	-	5 Jenis Laporan	5 Jenis Laporan	-	-	-
16	Tersusunnya jumlah Pergub/Keppub tentang OPA/unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD	-	-	7 BLUD	7 BLUD	-	-	3 BLUD	14 BLUD	-	-	-
17	Tersusunnya jumlah Pergub tentang Standar Biaya Umum untuk Penyusunan RKA-SKPA	-	-	2 dokumen SBU Pemerintah Aceh	49 skpa	-	-	2 dokumen SBU Pemerintah Aceh	49 skpa	-	-	-
18	Tersusunnya jumlah Dokumen KUA dan PPAS serta Dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBA	-	-	2 Dokumen KUA dan 2 Dokumen PPAS	49 skpa	-	-	2 Dokumen KUA dan 2 Dokumen PPAS	49 skpa	-	-	-
19	jumlah dokumen hasil evaluasi APBK kab/kota	-	-	46 Keppub	46 KepGub	-	-	43 Keppub	45 Keppub	-	-	-
20	jumlah rakor tentang evaluasi pedoman pengelolaan keuangan daerah	-	-	95 Org	95 orang	-	-	95 Org	95 Org	-	-	-
21	jumlah laporan pertanggungjawaban APBK yang dievaluasi	-	-	23 Keppub	23 KepGub	-	-	23 Keppub	23 Keppub	-	-	-
22	jumlah bimtek yang dilaksanakan mengenai penyusunan APBK dan pertanggung jawaban APBK	-	-	470 Org	-	-	-	470 Org	-	-	-	-
23	jumlah dokumen digital APBD kab/kota yang tersedia pada sistem SIKD	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-
24	jumlah dokumen SP2D / penerbitan SP2D	-	-	Penerbitan SPD dan SP2D yang cepat, tepat dan Akurat SPD dan SP2D	30 SP2D, 300 SPD, 250 REGISTER SP2D	-	-	Penerbitan SPD dan SP2D yang cepat, tepat dan Akurat SPD dan SP2D	16.393 SP2D, 250 SPD, 218 REGISTER SP2D	-	-	-
25	jumlah laporan validasi dan entri data	-	-	BKU, Laporan Bulanan/triwaran/semester/tahunan, penerimaan dana transfer dan belanja daerah Laporan	250 BKU, 12 Posisi Kas, 12 Ringkasan Realisasi, 12 Realisasi APBA, 4 LKT, 1 LRT, 250 Rekonsiliasi Kas	-	-	BKU, Laporan Bulanan/triwaran/semester/tahunan, penerimaan dana transfer dan belanja daerah Laporan	152 BKU, 12 Posisi Kas, 12 Ringkasan Realisasi, 12 Realisasi APBA, 4 LKT, 0 LRT, 252 Rekonsiliasi Kas	-	-	-
26	dokumen administrasi penggajian PNSD	-	-	Penerbitan SP2D Gaji, SKPP dan Rekapitulasi potongan pajak/Zis SP2D Gaji, SKPP dan rekapitulasi potongan pajak/Zis	1000 SP2D Gaji, 800 SKPP, 12 Rekapitulasi Pajak, 3 Potongan Pihak Ketiga, 4 Potongan FPK, 12 Potongan Taperum	-	-	Penerbitan SP2D Gaji, SKPP dan Rekapitulasi potongan pajak/Zis SP2D Gaji, SKPP dan rekapitulasi potongan pajak/Zis	1178 SP2D Gaji, 880 SKPP, 12 Rekapitulasi Pajak, 1 Potongan Pihak Ketiga, 4 Potongan FPK, 12 Potongan Taperum	-	-	-
27	jumlah bendahara yang bersertifikat bendahara	-	-	100 orang	150 orang	-	-	102 orang	150 orang	-	-	-
28	jumlah laporan rekonsiliasi dan konsolidasi	-	-	50 SKPA	360 Laporan	-	-	46 SKPA	360 Laporan	-	-	-

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

	Rasio nilai barang milik daerah yang clear & clean per total barang milik daerah			100%	60%	-		100%	75%	-		-
1	Jumlah laporan data BMA yang akuntabel	-	-	47 SKPA , 228 buku , 4 buku, 1 tahun anggaran	2 Laporan BMA, 47 buku inventaris SKPA, 1 tahun anggaran, 2 berita acara, 1 Tahun Anggaran	-	-	47 SKPA , 228 buku , 4 buku, 1 tahun anggaran	4 Laporan BMA, 48 buku inventaris SKPA, 1 tahun anggaran, 4 berita acara, 1 Tahun Anggaran	-	-	-
2	Jumlah laporan pengelolaan BMA	-	-	2 kali, 360 uni/barang, 2 modul	1 Tahun, 1 KepGub BMA	-	-	1 kali BIMTEK	1 Tahun, 1 KepGub BMA	-	-	-
3	Pergub RKBMA	-	-	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	-	-	1 kali kegiatan	-	-	-	-
4	Jumlah laporan aset yang dikeluarkan dari pencatatan Barang Milik Aceh	-	-	3 kali	4286 Unit Barang	-	-	3 kali	4286 Unit Barang	-	-	-
5	Jumlah laporan legalitas perpindahtanganan aset	-	-	12 kali kegiatan	4286 Unit Barang	-	-	35 kali kegiatan	4286 Unit Barang	-	-	-
6	jumlah sertifikat kepemilikan BMA	-	-	10 Sertifikat, 15 Plang Papan Nama, 4 Asrama	10 Sertifikat, 8 PBB Asrama	-	-	10 Sertifikat, 15 Plang Papan Nama, 4 Asrama	12 Sertifikat, 8 PBB Asrama	-	-	-
7	jumlah laporan BMA yang dilakukan pemanfaatan	-	-	3 kegiatan	1 kegiatan	-	-	3 kegiatan	4 kegiatan	-	-	-
8	Kepgub standar satuan harga barang dan jasa dan standar satuan harga barang bangunan dan jasa	-	-	2 Keputusan Gubernur	2 Keputusan Gubernur	-	-	2 Keputusan Gubernur tapi disatukan dalam 1 Kepgub	-	-	-	-
	Persentase Pendapatan Asli Aceh Terhadap Total Pendapatan Aceh	-	-	100%	Persentase PAA 16.51% dari pendapatan	-	-	100%	-	-	-	-
1	jumlah peningkatan pendapatan asli aceh	-	-	2.4 Triliun	2.18 Triliun	-	-	2.25 Triliun	1.90 Triliun	-	-	-
2	Tersedianya data dan laporan penerimaan dana desentralisasi	-	-	3 (sumber dana) jenis laporan	-	-	-	3 (sumber dana) jenis laporan	-	-	-	-
3	tersampaikan himbauan pajak di 23 kabupaten/kota	-	-	100%	-	-	-	90%	-	-	-	-
4	database potensi objek dan subjek pajak kendaraan bermotor	-	-	850.000 Unit Kendaraan	1 Laporan	-	-	864501 Unit Kendaraan	880536 Unit Kendaraan	-	-	-
5	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD I Banda Aceh	-	-	178.014 Unit Kendaraan	-	-	-	211863 Unit Kendaraan	-	-	-	-
6	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD II Aceh Besar	-	-	64.790 Unit Kendaraan	-	-	-	57273 Unit Kendaraan	-	-	-	-
7	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD III Pidie	-	-	74.163 Unit Kendaraan	-	-	-	65023 Unit Kendaraan	-	-	-	-
8	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD IV Bireuen	-	-	50.221 Unit Kendaraan	-	-	-	72779 Unit Kendaraan	-	-	-	-
9	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD V Lhokseumawe	-	-	56.075 Unit Kendaraan	-	-	-	52403 Unit Kendaraan	-	-	-	-
10	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD VI Aceh Utara	-	-	22.676 Unit Kendaraan	-	-	-	78033 Unit Kendaraan	-	-	-	-



## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

11	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD VII Aceh Timur	-	-	28.171 Unit Kendaraan	-	-	-	46707 Unit Kendaraan	-	-	-	-
12	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD VIII Langsa	-	-	31.137 Unit Kendaraan	-	-	-	34027 Unit Kendaraan	-	-	-	-
13	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD IX Aceh Tamiang	-	-	34.060 Unit Kendaraan	-	-	-	46159 Unit Kendaraan	-	-	-	-
14	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD X Bener Meriah	-	-	21.279 Unit Kendaraan	-	-	-	21282 Unit Kendaraan	-	-	-	-
15	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XI Aceh Tengah	-	-	37.968 Unit Kendaraan	-	-	-	31808 Unit Kendaraan	-	-	-	-
16	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XII Gayo Lues	-	-	5.866 Unit Kendaraan	-	-	-	7324 Unit Kendaraan	-	-	-	-
17	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XIII Aceh Tenggara	-	-	11.982 Unit Kendaraan	-	-	-	11931 Unit Kendaraan	-	-	-	-
18	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XIV Aceh Jaya	-	-	13.533 Unit Kendaraan	-	-	-	9307 Unit Kendaraan	-	-	-	-
19	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XV Aceh Barat	-	-	38.518 Unit Kendaraan	-	-	-	33215 Unit Kendaraan	-	-	-	-
20	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XVI Nagan Raya	-	-	22.064 Unit Kendaraan	-	-	-	19610 Unit Kendaraan	-	-	-	-
21	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XVII Aceh Barat Daya	-	-	22.502 Unit Kendaraan	-	-	-	16941 Unit Kendaraan	-	-	-	-
22	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XVIII Aceh Selatan	-	-	19.660 Unit Kendaraan	-	-	-	22409 Unit Kendaraan	-	-	-	-
23	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XIX Aceh Singkil	-	-	14.854 Unit Kendaraan	-	-	-	9207 Unit Kendaraan	-	-	-	-
24	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XX Sabang	-	-	2.380 Unit Kendaraan	-	-	-	9359 Unit Kendaraan	-	-	-	-
25	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XXI Simeulue	-	-	4.754 Unit Kendaraan	-	-	-	5161 Unit Kendaraan	-	-	-	-
26	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XXII Pidie Jaya	-	-	18.803 Unit Kendaraan	-	-	-	19109 Unit Kendaraan	-	-	-	-
27	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XXIII Subulussalam	-	-	5.946 Unit Kendaraan	-	-	-	5534 Unit Kendaraan	-	-	-	-
28	Terwujudnya Pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	1 aplikasi	1 aplikasi	-	-	1 aplikasi	-	-	-	-
29	Laporan Penerimaan dana desentralisasi	-	-	-	4 Laporan	-	-	-	4 Laporan	-	-	-
30	Jumlah Sosialisasi pajak Aceh yang dilaksanakan	-	-	-	50%	-	-	-	50%	-	-	-

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

31	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD I Banda Aceh	-	-	-	188361 Unit Kendaraan	-	-	-	156974 Unit Kendaraan	-	-	-
32	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD II Aceh Besar	-	-	-	75032 Unit Kendaraan	-	-	-	115306 Unit Kendaraan	-	-	-
33	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD III Pidie	-	-	-	80351 Unit Kendaraan	-	-	-	84711 Unit Kendaraan	-	-	-
34	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD IV Bireuen	-	-	-	49719 Unit Kendaraan	-	-	-	99318 Unit Kendaraan	-	-	-
35	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD V Lhokseumawe	-	-	-	63434 Unit Kendaraan	-	-	-	56445 Unit Kendaraan	-	-	-
36	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD VI Aceh Utara	-	-	-	75314 Unit Kendaraan	-	-	-	99824 Unit Kendaraan	-	-	-
37	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD VII Aceh Timur	-	-	-	37789 Unit Kendaraan	-	-	-	60363 Unit Kendaraan	-	-	-
38	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD VIII Langsa	-	-	-	35776 Unit Kendaraan	-	-	-	40725 Unit Kendaraan	-	-	-
39	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD IX Aceh Tamiang	-	-	-	46053 Unit Kendaraan	-	-	-	54999 Unit Kendaraan	-	-	-
40	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD X Bener Meriah	-	-	-	21066 Unit Kendaraan	-	-	-	24277 Unit Kendaraan	-	-	-
41	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XI Aceh Tengah	-	-	-	37588 Unit Kendaraan	-	-	-	37461 Unit Kendaraan	-	-	-
42	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XII Aceh Barat	-	-	-	44073 Unit Kendaraan	-	-	-	47717 Unit Kendaraan	-	-	-
43	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XIII Nagan Raya	-	-	-	26793 Unit Kendaraan	-	-	-	33252 Unit Kendaraan	-	-	-
44	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XIV Aceh Barat Daya	-	-	-	22277 Unit Kendaraan	-	-	-	22631 Unit Kendaraan	-	-	-
45	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XV Aceh Selatan	-	-	-	23423 Unit Kendaraan	-	-	-	34743 Unit Kendaraan	-	-	-
46	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XVI Pidie Jaya	-	-	-	21090 Unit Kendaraan	-	-	-	24375 Unit Kendaraan	-	-	-
47	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XVII Sabang	-	-	-	2356 Unit Kendaraan	-	-	-	11257 Unit Kendaraan	-	-	-
48	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XVIII Aceh Jaya	-	-	-	15378 Unit Kendaraan	-	-	-	15330 Unit Kendaraan	-	-	-
49	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XIX Subulussalam	-	-	-	7372 Unit Kendaraan	-	-	-	9280 Unit Kendaraan	-	-	-
50	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XX Aceh Singkil	-	-	-	16685 Unit Kendaraan	-	-	-	15565 Unit Kendaraan	-	-	-
51	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XXI Gayo Lues	-	-	-	5807 Unit Kendaraan	-	-	-	9700 Unit Kendaraan	-	-	-
52	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XXII Aceh Tenggara	-	-	-	11862 Unit Kendaraan	-	-	-	15589 Unit Kendaraan	-	-	-
53	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XXIII Simuelue	-	-	-	5696 Unit Kendaraan	-	-	-	6997 Unit Kendaraan	-	-	-

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

	PERSENTASE LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN YANG TERSUSUN TEPAT WAKTU (LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI, DLL DIBAGI DENGAN TOTAL LAPORAN WAJIB	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-
	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-
1	Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Tahunan maupun Lima Tahunan	-	-	-	-	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	10 Dokumen	10 Dokumen	-
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	-	-	-	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	10 Dokumen	10 Dokumen	-
	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	24 Dokumen	24 Dokumen	-	-	24 Dokumen	24 Dokumen	-
2	Tersajinya Laporan Keuangan SKPA	-	-	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	-
3	Tersusunnya Laporan Keuangan	-	-	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	-
	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-
1	Tersedianya Pelayanan Jasa Pengadministrasian Kedinasan	-	-	-	-	1Tahun	1Tahun	-	-	1Tahun	1Tahun	-
	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-
1	Terwujudnya keseragaman pemakaian seragam dinas	-	-	-	-	400 PNS dan 400 NON PNS	400 PNS dan 400 NON PNS	-	-	400 PNS dan 400 NON PNS	400 PNS dan 400 NON PNS	-
2	SDM yang Handal	-	-	-	-	348 Orang	348 Orang	-	-	348 Orang	348 Orang	-

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-
1	Terpenuhinya kebutuhan Kelistrikan gedung kantor	-	-	-	-	1Tahun	1Tahun	-	-	1Tahun	1Tahun	-
2	tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor BPKA	-	-	-	-	1 Gedung	1 Gedung	-	-	1 Gedung	1 Gedung	-
3	tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Samsat	-	-	-	-	23 UPTD	23 UPTD	-	-	23 UPTD	23 UPTD	-
4	tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah dinas	-	-	-	-	6 UPTD	6 UPTD	-	-	6 UPTD	6 UPTD	-
5	Terlaksananya Adminstrasi Perkantoran	-	-	-	-	7 Bidang dan 23 UPTD	7 Bidang dan 23 UPTD	-	-	7 Bidang dan 23 UPTD	7 Bidang dan 23 UPTD	-
6	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	-	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-
7	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kantor	-	-	-	-	7 Bidang 23 UPTD	7 Bidang 23 UPTD	-	-	7 Bidang 23 UPTD	7 Bidang 23 UPTD	-
8	Peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah	-	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-
9	Terlaksananya tugas-tugas Dinas dan UPTD Kab/Kota	-	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-
10	tersedianya data dan dokumen kearsipan kantor terdata dengan baik	-	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-
	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-
1	tersedianya kendaraan dinas operasional	-	-	-	-	58 Unit	2 Unit	-	-	58 Unit	2 Unit	-
2	tersedianya Pembangunan dan rehabilitasi rumah dan gedung kantor UPTD	-	-	-	-	23 UPTD	23 UPTD	-	-	23 UPTD	23 UPTD	-
3	tersedianya rehabilitasi gedung kantor	-	-	-	-	1 Gedung BPKA	1 Gedung BPKA	-	-	1 Gedung BPKA	1 Gedung BPKA	-
	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-
1	Terlaksananya administrasi perkantoran	-	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-
2	Terpenuhinya Pelayanan administrasi kantor	-	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-
3	tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor	-	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-
4	Kebersihan kantor badan dan gudang arsip	-	-	-	-	23 UPTD	23 UPTD	-	-	23 UPTD	23 UPTD	-
5	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perkantoran dan Kesamsatan	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-
1	Terjaganya kendaraan dinas, terlaksananya tugas- tugas perkantoran	-	-	-	-	250 Kendaraan	250 Kendaraan	-	-	250 Kendaraan	250 Kendaraan	-
2	tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	-	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-
3	tersedianya pemeliharaan gedung kantor	-	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-
4	tersedianya pemeliharaan rumah dinas	-	-	-	-	23 UPTD	23 UPTD	-	-	23 UPTD	23 UPTD	-
	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	-	-	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	-
	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	-	-	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	-
1	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-
2	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-
3	Tersusunnya DPA-SKPA dan Perubahan DPA-SKPA	-	-	-	-	50 DPA & 50 DPPA	50 DPA & 50 DPPA	-	-	50 DPA & 50 DPPA	50 DPA & 50 DPPA	-
4	Tersusunnya Jumlah Qanun tentang APBA dan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA	-	-	-	-	1 Pergub 1 Qanun	1 Pergub 1 Qanun	-	-	1 Pergub 1 Qanun	1 Pergub 1 Qanun	-
5	Tersusunnya Jumlah Qanun tentang perubahan APBA dan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran perubahan APBA	-	-	-	-	1 Qanun 2 Pergub	1 Qanun 2 Pergub	-	-	1 Qanun 2 Pergub	1 Qanun 2 Pergub	-
6	Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	-	-	-	-	1 RanQanun	1 RanQanun	-	-	1 RanQanun	1 RanQanun	-
7	Tersusunnya Regulasi Bidang Anggaran	-	-	-	-	2 KepGub, 2 SE Gubernur, 3 PerGub	2 KepGub, 2 SE Gubernur, 3 PerGub	-	-	2 KepGub, 2 SE Gubernur, 3 PerGub	2 KepGub, 2 SE Gubernur, 3 PerGub	-
	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	-	-	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	-
1	tersedianya dokumen hasil evaluasi keputusan gubernur sebagai dasar penetapan APBK	-	-	-	-	23 kepgub	23 kepgub	-	-	23 kepgub	23 kepgub	-
2	tersedianya dokumen hasil evaluasi keputusan gubernur sebagai dasar penetapan perubahan APBK	-	-	-	-	23 kepgub	23 kepgub	-	-	23 kepgub	23 kepgub	-
3	tersedianya dokumen hasil evaluasi keputusan gubernur sebagai dasar penetapan perubahan APBK	-	-	-	-	23 kepgub	23 kepgub	-	-	23 kepgub	23 kepgub	-
4	terwujudnya pemahaman aparatur keuangan daerah dan terintegrasi data pengelolaan keuangan kab/kota berbasis aplikasi	-	-	-	-	95 orang	95 orang	-	-	95 orang	95 orang	-
5	meningkatnya pemahaman aparatur terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah	-	-	-	-	270 orang	270 orang	-	-	270 orang	270 orang	-

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	-	-	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	-
1	Penyelesaian Administrasi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah	-	-	-	-	4 Jenis Laporan, 1800 SP2D dan SKPP	4 Jenis Laporan, 1800 SP2D dan SKPP	-	-	4 Jenis Laporan, 1800 SP2D dan SKPP	4 Jenis Laporan, 1800 SP2D dan SKPP	-
2	Terselesaikannya Administrasi Belanja Daerah	-	-	-	-	250 Register SP2D dan 40000 SP2D	250 Register SP2D dan 40000 SP2D	-	-	250 Register SP2D dan 40000 SP2D	250 Register SP2D dan 40000 SP2D	-
3	Terselesaikannya Administrasi Pengelolaan Kas Daerah	-	-	-	-	1 SK dan 250 Rekonsiliasi	1 SK dan 250 Rekonsiliasi	-	-	1 SK dan 250 Rekonsiliasi	1 SK dan 250 Rekonsiliasi	-
4	Laporan Penerimaan Dana Desentralisasi	-	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	-	-	4 Laporan	4 Laporan	-
5	Terselesaikannya Administrasi Pendapatan dan Belanja Daerah	-	-	-	-	6 Jenis Laporan	6 Jenis Laporan	-	-	6 Jenis Laporan	6 Jenis Laporan	-
6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	-	-	-	-	250 BKU	250 BKU	-	-	250 BKU	250 BKU	-
7	Terselesaikannya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan, Bendahara yang memiliki Sertifikat Bendahara, Peningkatan Pemahaman tentang Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	3 Draft Pergub/ SE Gub dan 80 Draft SK PA/KPA	3 Draft Pergub/ SE Gub dan 80 Draft SK PA/KPA	-	-	3 Draft Pergub/ SE Gub dan 80 Draft SK PA/KPA	3 Draft Pergub/ SE Gub dan 80 Draft SK PA/KPA	-
	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	-	-	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	-
1	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA (LRA, Neraca, Arus Kas, LO, LPE, LPSAL dan CaLK)	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	-
2	Laporan Keuangan Akuntabel	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-
3	Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh	-	-	-	-	1 Buku	1 Buku	-	-	1 Buku	1 Buku	-
4	Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja	-	-	-	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	-
	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	-	-	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	-
1	Terlaksananya kegiatan untuk Pengembangan Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-
2	Tersalurkannya bantuan keuangan khusus	-	-	-	-	3 Jenis Laporan	3 Jenis Laporan	-	-	3 Jenis Laporan	3 Jenis Laporan	-
	Rasio nilai barang milik daerah yang clear & clean per total barang milik daerah	-	-	-	-	80%	80%	-	-	80%	80%	-
	Rasio nilai barang milik daerah yang clear & clean per total barang milik daerah	-	-	-	-	80%	80%	-	-	80%	80%	-
1	Daftar Standar Satuan Harga	-	-	-	-	1 kepgub	1 kepgub	-	-	1 kepgub	1 kepgub	-
2	Daftar Hasil telaahan dan pembahasan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	1 kepgub	1 kepgub	-	-	1 kepgub	1 kepgub	-
3	Peningkatan kualitas SDM	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	-	-	1 laporan	1 laporan	-
4	Tersedianya bukti kepemilikan BMA	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	-	-	1 laporan	1 laporan	-
5	Tersedianya Tanda Kepemilikan Tanah	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	-	-	1 laporan	1 laporan	-
6	daftar hasil revaluasi barang milik aceh	-	-	-	-	1 kepgub BMA 2 kegiatan	1 kepgub BMA 2 kegiatan	-	-	1 kepgub BMA 2 kegiatan	1 kepgub BMA 2 kegiatan	-
7	Terlaksananya Hibah, Penjualan, Tukar menukar dan Penyertaan Modal	-	-	-	-	7 SK	7 SK	-	-	7 SK	7 SK	-

	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap total pendapatan Aceh	-	-	-	-	28%	28%	-	-	28%	28%	-
	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap total pendapatan Aceh	-	-	-	-	28%	28%	-	-	28%	28%	-
1	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	-	-	-	-	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	-	-	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	-
2	Termutakhirnya basis data pajak dan retribusi Aceh	-	-	-	-	1200000 Basis Data	1200000 Basis Data	-	-	1200000 Basis Data	1200000 Basis Data	-
3	Terwujudnya Pelayanan Samsat Yang Prima	-	-	-	-	860000 Wajib Pajak	860000 Wajib Pajak	-	-	860000 Wajib Pajak	860000 Wajib Pajak	-
4	pelatihan dan rapat koordinasi	-	-	-	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	-

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPA

Sinergitas program dan arah kebijakan Kementerian Keuangan untuk Provinsi Aceh adalah pada pemberian alokasi dana yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus, sedangkan untuk sinergitas program dan arah kebijakan dengan Pemerintah kabupaten/kota kami mengambil *sample* pada beberapa kab/kota saja, yaitu:

1. BPKD Kota Sabang, arah kebijakan serta program yang beririsan antara BPKA dengan BPKD kota Sabang terdapat pada keinginan bersama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak, retribusi dan pengelola aset daerah;
2. BPKD Kab.Aceh Barat, tujuan sasaran dan program kerja yang beririsan dengan BPKD Kab. Aceh Barat berada pada meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta pada tata pengelolaan dan pemanfaatan Bangunan Milik Daerah.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, maka peran BPKA sangatlah penting dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Aceh mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBA namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Dalam melakukan tugas dan kewajibannya BPKA mengalami beberapa permasalahan seperti tersebut pada tabel berikut :

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Sarana dan Prasarana	Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang pelaksanaan tugas seperti komputer, printer, gedung samsat yang kurang layak, gudang arsip, lahan untuk pembangunan sarana perkantoran serta sarana lain yang menyangkut dengan pelayanan kepada masyarakat	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas seperti komputer, printer, gedung samsat yang kurang layak, gudang arsip, lahan untuk pembangunan sarana perkantoran
		Terbatasnya sarana dan prasarana pada layanan unggulan <i>Drive Thru</i>	Sering terjadi kemacetan di sekitar KB Samsat Banda Aceh
2	Sumber Daya Manusia	Masih kurangnya kualitas SDM aparatur di bidang pengelolaan keuangan baik pada sektor kesamsatan, pelaporan, asset, pendapatan dan penganggaran	Kualitas sumber daya manusia masih kurang pada sektor kesamsatan, pelaporan, asset, pendapatan dan penganggaran
		Jumlah pegawai yang tersedia masih kurang terutama yang terdapat pada samsat	Kurangnya jumlah pegawai yang tersedia terutama yang terdapat pada samsat
3	Kelembagaan	Struktur organisasi BPKA yang di tetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 Dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2018 belum mampu mengakomodir tugas dan fungsi BPKA terutama tugas asset, serta informasi teknologi dan bidang anggaran terutama setelah dikeluarkannya Permendagri Nomor 5 Tahun 2017	Tugas dan fungsi BPKA yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 Dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2018 belum mampu mengakomodir keseluruhan tugas yang ada di BPKA terutama setelah dikeluarkannya Permendagri Nomor 5 Tahun 2017
4	Regulasi	Banyaknya regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah pusat	Banyaknya regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah pusat



		mengakibatkan pemerintah daerah harus terus menyesuaikan diri	mengakibatkan pemerintah daerah harus terus menyesuaikan diri
		Belum lengkapnya sistem dan prosedur (sisdur), serta SOP tentang pengelolaan keuangan, aset dan penganggaran serta penatausahaan	Belum lengkapnya sistem dan prosedur (sisdur) pengelolaan keuangan serta SOP
<b>5</b>	Kemandirian Daerah	Pendapatan aceh belum mampu memberikan kontribusi besar terhadap jumlah belanja yang setiap tahunnya, sehingga Aceh masih sangat bergantung pada pendapatan transfer	Persentase pendapatan aceh tidak sebanding dengan belanja yang mengakibatkan Aceh masih bergantung pada pemerintah pusat
		Masih banyaknya potensi pajak yang lost terutama pajak kendaraan bermotor	Masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor
		Pelaksanaan Pajak Progresif masih terkendala	Pemilik kendaraan bermotor masih belum melengkapi KTP pemilik kendaraan bermotor

Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa terdapat 5 (lima) masalah pokok pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yaitu :

- (1) Sarana dan Prasarana, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang pelaksanaan tugas seperti komputer, printer, gedung samsat yang kurang layak, gudang arsip, lahan untuk pembangunan sarana perkantoran serta sarana lain yang menyangkut dengan pelayanan kepada masyarakat, yang menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Sumber Daya Manusia, kurangnya kualitas SDM aparatur di bidang pengelolaan keuangan baik pada sektor pelaporan keuangan, aset, pendapatan dan penganggaran serta evaluasi APBD kab/kota sehingga perlu untuk lebih meningkatkan kualitas aparatur serta jumlah pegawai yang tersedia masih kurang terutama yang terdapat pada kesamsatan;

- (3) Kelembagaan, struktur organisasi BPKA yang di tetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2018 belum mampu mengakomodir tugas dan fungsi BPKA terutama tugas asset, informasi teknologi dan bidang anggaran terutama setelah dikeluarkannya Permendagri Nomor 5 Tahun 2017;
- (4) Regulasi, banyaknya regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah pusat mengakibatkan pemerintah daerah harus terus menyesuaikan diri dan belum lengkapnya sistem dan prosedur pengeloaan keuangan dan SOP sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- (5) Kemandirian Daerah, pendapatan Aceh belum mampu memberikan kontribusi besar terhadap jumlah belanja yang harus dibiayai setiap tahunnya, sehingga Aceh masih sangat bergantung pada dana transfer dilain sisi juga masih terdapat potensi pajak yang lost terutama pajak kendaraan bermotor.

Salah satu tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah mensukseskan visi Gubernur Aceh yaitu **‘Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani dengan pengertian tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata’**.

Sedangkan dari misi-misi yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh ditugaskan mendukung mensukseskan misi ke 1 yakni *Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani* dengan program unggulannya ***Aceh Peumulia***.

Faktor pendukung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah tim kerja yang solid serta sudah diterapkannya manajemen yang rapi dan modern yang berbasis aplikasi teknologi informasi sehingga

dapat menjamin transparansi dan efektifitas pelaksanaan tugas. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum mencukupinya jumlah pegawai yang berada di unit pelaksana teknis daerah serta sarana dan prasarana yang masih minim.

BPKA diantaranya mempunyai tugas dalam melakukan Pengelola Aset Aceh, Perumusan kebijakan tentang Pendapatan Daerah, pemungutan pajak aceh memiliki unit pelaksana teknis daerah yang tersebar di seluruh wilayah Kab/kota di Aceh, salah satu tugas dan fungsi UPTD tersebut adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan, sehingga pemenuhan sarana dan prasarana yang representatif bagi masyarakat sangatlah wajib untuk dipenuhi. Setiap tahunnya perlu dilakukan terus menerus pembenahan pada sektor pelayanan seperti ruang tunggu wajib pajak yang ber AC, representatif untuk segala usia, responsif gender, dan sarana pelaksanaan tugas yang memadai.

Berdasarkan kinerja pelayanan di atas dapat diinventarisasi tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana pelayanan masih butuh peningkatan;
- b. Sumber daya yang tersedia baik kualitas dan kuantitasnya masih kurang;
- c. Ada beberapa bidang dan UPTD yang strukturnya belum bisa menyelesaikan beban dan tanggungjawab yang diberikan;
- d. Pendapatan Asli Aceh belum mampu memberikan kontribusi yang besar bagi kebutuhan belanja pemerintah Aceh;
- e. Tertib administrasi kepemilikan aset masih harus terus ditingkatkan;
- f. Pengamanan aset pemerintah Aceh baik administrasi maupun fisiknya harus terus diperkuat;
- g. Menemukan sumber-sumber pendapatan terbaru dalam rangka mempersiapkan berakhirnya alokasi dana otonomi khusus.

Kemungkinan beberapa peluang yang dapat dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah :

- a. Peningkatan kualitas dan kontinuitas pelayanan terbaik;
- b. Tersedianya sistem informasi yang komprehensif dan integratif dalam Pengelolaan keuangan;
- c. Mengidentifikasi dan menggali sumber-sumber yang dapat menghasilkan pendapatan, baik itu sumber baru ataupun yang lama;
- d. Memanfaatkan database kendaraan bermotor untuk dapat meningkatkan pendapatan pada sektor PKB maupun BBNKB;
- e. Status aset Pemerintah Aceh telah terdata dengan baik, sehingga perlu terus ditingkatkan pengelolaannya dan pengamanan terhadap aset tersebut;
- f. Terdapat aset-aset pemerintah Aceh yang ekonomis dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah;

Isu-isu penting dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas, yaitu:

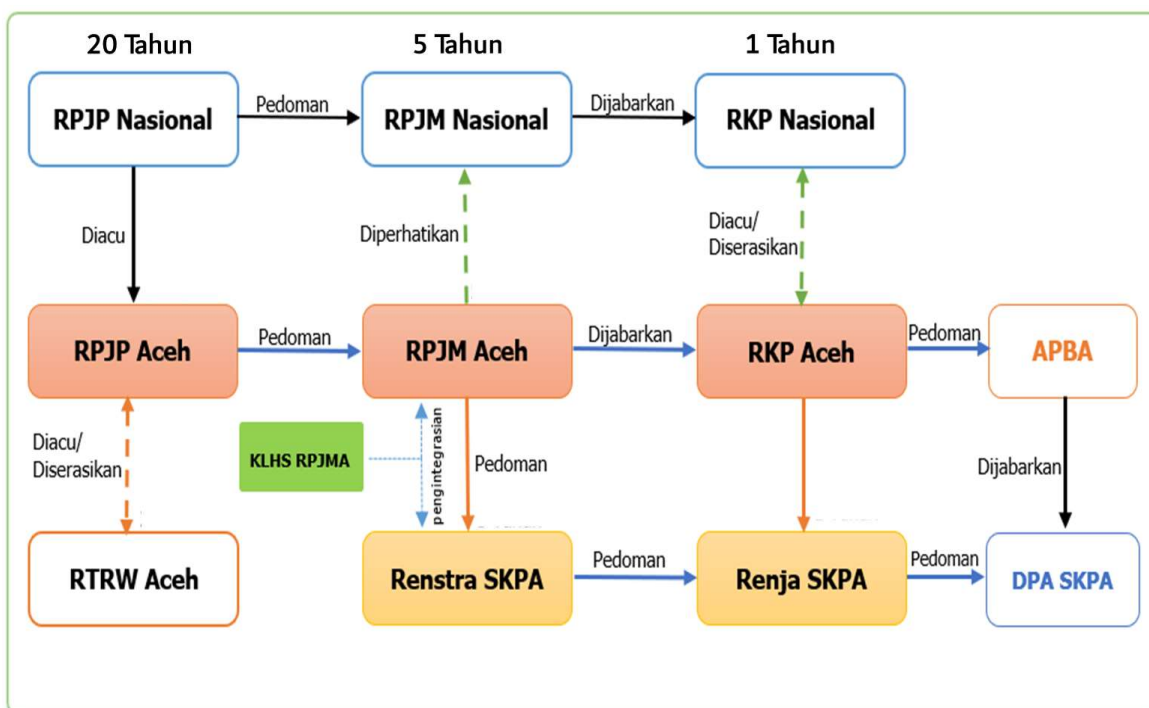
- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang pelaksanaan tugas seperti komputer, printer, gedung samsat yang kurang layak, gudang arsip, lahan untuk pembangunan sarana perkantoran serta sarana lain yang menyangkut dengan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masih kurangnya kualitas SDM aparatur yang dibutuhkan di bidang pengelolaan keuangan baik pada sektor kesamsatan, perencanaan, pelaporan, aset, pendapatan dan penganggaran;
- c. Jumlah pegawai yang tersedia masih kurang terutama yang terdapat pada UPTD;

- d. Struktur organisasi BPKA yang di tetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2018 belum mampu mengakomodir tugas dan fungsi BPKA terutama tugas aset, pendapatan, informasi teknologi dan bidang anggaran terutama setelah dikeluarkannya Permendagri Nomor 5 Tahun 2017;
- e. Banyaknya regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah pusat mengakibatkan pemerintah daerah harus terus menyesuaikan diri terutama peralihan kewenangan terhadap SMA dan SMK yang dulu menjadi kewenangan kab/kota sekarang menjadi kewenangan Provinsi;
- f. Belum lengkapnya payung hukum dalam pelaksanaan tugas seperti SOP dan sistem serta prosedur pengeloaan keuangan;
- g. Pendapatan Aceh belum mampu memberikan kontribusi besar terhadap jumlah belanja yang setiap tahunnya, sehingga Aceh masih sangat bergantung pada dana transfer;
- h. Masih banyaknya potensi pajak yang lost terutama pajak kendaraan bermotor;
- i. Diperlukan objek baru pada sektor pendapatan demi mempersiapkan diri dari ketergantungan daerah pada pendapatan yang bersumber dari otsus;
- j. Implementasi transaksi non tunai.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA**

Dokumen rancangan Renja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPA yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program dan kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh serta identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai.

Rencana Kerja bisa berjalan dengan baik dan sesuai tujuannya apabila didukung dengan perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah dimaksud di antaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).



HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja dari Rancangan Awal RKPA berjalan secara paralel dalam kurun waktu yang bersamaan, sehingga ketika ranwal RKPA telah ditetapkan maka seluruh Perangkat Daerah perlu melakukan perbandingan-perbandingan antara ranwal renja yang telah disusun dengan Rancangan Awal RKPA yang telah ditetapkan, guna menghindari inkonsistensi perencanaan antara Pemerintah Daerah dan perangkatnya, dan Rencana Kerja BPKA sudah sinkron tidak terdapat perbedaan dengan

rancangan awal RKPA. Informasi review terhadap rancangan awal RKPA dapat dilihat pada tabel 2.4.

TABEL 2.4  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2022  
PROVINSI ACEH

SKPA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

NO	RANCANGAN AWAL RKPA					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	PERSENTASE LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN YANG TERSUSUN TEPAT WAKTU (LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI, DLL DIBAGI DENGAN TOTAL LAPORAN WAJIB	100%	221.389.108.210	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	PERSENTASE LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN YANG TERSUSUN TEPAT WAKTU (LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI, DLL DIBAGI DENGAN TOTAL LAPORAN WAJIB	100%	204.291.614.220	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100%	2.360.900.025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100%	2.146.272.750	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Tahunan maupun Lima Tahunan	10 Dokumen	692.983.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, RTP, LAKIP	10 Dokumen	629.985.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	10 Dokumen	1.667.916.525	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Dokumen RKA, DPA, RKA/DPA-P	10 Dokumen	1.516.287.750	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100%	105.975.340.964	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100%	96.541.219.058	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	24 Dokumen	104.184.242.458	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	24 Dokumen	94.712.947.689	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersajinya Laporan Keuangan SKPA	5 Dokumen	1.013.532.108	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPA	5 Dokumen	921.392.825	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Laporan Keuangan	5 Dokumen	777.566.398	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPA	5 Dokumen	906.878.544	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.718.464.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	2.562.240.000	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersedianya Pelayanan Jasa Pengadministrasian Kedinasaan	1Tahun	1.718.464.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersedianya Tertib Aset SKPA	1Tahun	2.562.240.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100%	2.742.917.194	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100%	2.493.561.085	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terwujudnya keseragaman pemakaian seragam dinas	400 PNS dan 400 NON PNS	1.061.127.194	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terpenuhiya Seragam Dinas bagi Aparatur Terpenuhiya Seragam Dinas bagi Aparatur	400 PNS dan 400 NON PNS	964.661.085	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	SDM yang Handal	348 Orang	1.681.790.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terpenuhiya Bimtek bagi Aparatur	348 Orang	1.528.900.000	



## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100%	26.924.246.447	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100%	27.276.587.679	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terpenuhinya kebutuhan Kelistrikan gedung kantor	1 Tahun	866.823.233	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terpenuhinya Komponen Listrik	1 Tahun	1.788.021.121	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor BPKA	1 Gedung	17.320.229.521	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor BPKA	1 Gedung	15.745.663.201	
			tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Samsat	23 UPTD				tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Samsat	23 UPTD		
			tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah dinas	6 UPTD				tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah dinas	6 UPTD		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terlaksananya Administrtasi Perkantoran	7 Bidang dan 23 UPTD	3.769.342.862	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terpenuhinya ATK, Makan minum, Alat Kebersihan	7 Bidang dan 1 Tahun	4.426.675.329	
			Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	1 Tahun							
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kantor	7 Bidang 23 UPTD	1.053.410.631	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terpenuhinya bahan Cetak kedinasan	7 Bidang 23 UPTD	957.646.028	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah	1 Tahun	49.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terpenuhinya Buku Bacaan	1 Tahun	45.000.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terlaksananya tugas-tugas Dinas dan UPTD Kab/Kota	1 Tahun	2.811.635.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersedianya Perjalanan Dinas	1 Tahun	2.956.032.000	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	tersedianya data dan dokumen kearsipan kantor terdata dengan baik	1 Tahun	1.053.305.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Kearsipan Dinas menjadi tertib dan teratur	1 Tahun	1.357.550.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100%	46.029.335.351	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100%	34.497.118.719	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	tersedianya kendaraan dinas operasional	58 Unit	9.800.220.760	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terpenuhinya Kendaraan untuk Operasional Kedinasan	2 Unit	1.561.560.000	
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	tersedianya Pembangunan dan rehabilitasi rumah dan gedung kantor UPTD	23 UPTD	36.229.114.591	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersedianya Gedung Samsat, Rumah Dinas, Gedung Arsip Samsat	12 UPTD	32.935.558.719	
			tersedianya rehabilitasi gedung kantor	1 Gedung BPKA							
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100%	28.187.540.798	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100%	32.306.138.279	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terlaksananya administrasi perkantoran	1 Tahun	440.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terpenuhinya Surat Kedinasan	1 Tahun	400.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terpenuhinya Pelayanan administrasi kantor	1 Tahun	5.903.547.254	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terpenuhinya kebutuhan PDAM, Listrik, Telpon	1 Tahun	7.366.861.140	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor	1 Tahun	1.946.784.664	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terpeliharanya Peralatan Perlengkapan	1 Tahun	2.769.804.240	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Kebersihan kantor badan dan gudang arsip	23 UPTD	19.897.208.880	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Gaji Non ASN kantor induk dan UPTD	23 UPTD	21.769.472.899	
			Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perkantoran dan Kesamsatan	100%							

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	7.450.363.432	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	6.468.476.650
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terjaganya kendaraan dinas, terlaksananya tugas- tugas perkantoran	250 Kendaraan	2.097.590.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terjaganya kendaraan dinas, terlaksananya tugas- tugas perkantoran	250 Kendaraan	2.906.900.000
			tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	1 Tahun					1 Tahun	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	tersedianya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	5.352.773.432	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terpenuhinya pemeliharaan gedung UPTD, dan Rumah Dinas	1 Gudang	3.561.576.650
			tersedianya pemeliharaan rumah dinas	23 UPTD					1 Gedung Induk	
									23 UPTD	
11	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	WTP WTP/WDP	3.820.875.411.341	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	WTP WTP/WDP	4.319.507.232.621
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	WTP WTP/WDP	15.026.904.098	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	WTP WTP/WDP	7.760.821.800
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	3.796.761.100	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	2.351.601.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	856.844.450	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Dokumen KUA PPAS-P	2 Dokumen	578.949.500
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya DPA-SKPA dan Perubahan DPA-SKPA	50 DPA & 50 DPPA	1.404.546.715	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Dokumen RKA/DPA SKPA	50 DPA & 50 DPPA	976.860.600
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Jumlah Qanun tentang APBA dan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA	1 Pergub 1 Qanun	4.086.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBA	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Dokumen Qanun APBA dan Penjabaran APBA	1 Pergub 1 Qanun	1.815.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Jumlah Qanun tentang perubahan APBA dan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran perubahan APBA	1 Qanun 2 Pergub	188.806.750	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Dokumen Qanun APBA-P dan Penjabaran APBA-P	1 Qanun 2 Pergub	171.642.500
6	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	1 RanQanun	4.693.445.083	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Dokumen Aturan terkait SBU, ASB, RKI, SE Penyusunan APBA	1 RanQanun	1.866.768.200
			Tersusunnya Regulasi Bidang Anggaran	2 KepGub, 2 SE Gubernur, 3 PerGub					2 KepGub, 2 SE Gubernur, 3 PerGub	
2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	WTP WTP/WDP	6.797.694.122	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	WTP WTP/WDP	5.279.721.800
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	tersedianya dokumen hasil evaluasi keputusan gubernur sebagai dasar penetapan APBK	23 kepgub	2.163.829.626	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya dokumen hasil evaluasi gubernur penetapan APBK	23 kepgub	1.467.117.800
2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	tersedianya dokumen hasil evaluasi keputusan gubernur sebagai dasar penetapan perubahan APBK	23 kepgub	903.383.250	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Dokumen dokumen hasil evaluasi gubernur penetapan perubahan APBK	23 kepgub	821.257.500
3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	tersedianya dokumen hasil evaluasi keputusan gubernur sebagai dasar penetapan perubahan APBK	23 kepgub	903.383.250	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Dokumen dokumen hasil evaluasi gubernur penetapan Pertanggungjawaban APBK	23 kepgub	821.257.500
4	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	terwujudnya pemahaman aparatur keuangan daerah dan terintegrasi data pengelolaan keuangan kab/kota berbasis aplikasi	95 orang	1.047.792.900	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Asistensi ke Kab/kota	95 orang	952.539.000
5	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	meningkatnya pemahaman aparatur terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah	270 orang	1.779.305.096	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Sosialisasi utk Kab/Kota	270 orang	1.217.550.000

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

3	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	WTP WTP/WDP	6.135.661.814	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	WTP WTP/WDP	8.459.332.450
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Penyelesaian Administrasi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah Terselesaikannya Administrasi Belanja Daerah Terselesaikannya Administrasi Pengelolaan Kas Daerah	4 Jenis Laporan, 1800 SP2D dan SKPP 250 Register SP2D dan 40000 SP2D 1 SK dan 250 Rekonsiliasi	2.224.815.237	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Penyelesaian Administrasi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah Terselesaikannya Administrasi Belanja Daerah Terselesaikannya Administrasi Pengelolaan Kas Daerah	4 Jenis Laporan, 1800 SP2D dan SKPP 250 Register SP2D dan 40000 SP2D 1 SK dan 250 Rekonsiliasi	2.822.559.300
2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Laporan Penerimaan Dana Desentralisasi Terselesaikannya Administrasi Pendapatan dan Belanja Daerah	4 Laporan 6 Jenis Laporan	2.367.083.100	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terselesaikannya Administrasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tersusunnya Laporan Penerimaan Dana Desentralisasi	4 Laporan 6 Jenis Laporan	1.751.893.700
3	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	250 BKU	556.029.595	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	250 BKU	1.905.481.450
4	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terselesaikannya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan, Bendahara yang memiliki Sertifikat Bendahara, Peningkatan Pemahaman tentang Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	3 Draft Pergub/ SE Gub dan 80 Draft SK PA/KPA	987.733.882	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terselesaikannya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan, Bendahara yang memiliki Sertifikat Bendahara, Peningkatan Pemahaman tentang Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	3 Draft Pergub/ SE Gub dan 80 Draft SK PA/KPA	1.979.398.000
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	WTP WTP/WDP	7.302.609.695	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	WTP WTP/WDP	8.820.000.250
1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA (LRA, Neraca, Arus Kas, LO, LPE, LPSAL dan CaLK)	1 Laporan	2.242.451.200	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA (LRA, Neraca, Arus Kas, LO, LPE, LPSAL dan CaLK)	1 Laporan	2.138.592.250
2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Laporan Keuangan Akuntabel	1 Kegiatan	3.390.114.200	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Laporan Keuangan Akuntabel	1 Kegiatan	2.343.185.914
3	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh	1 Buku	588.355.995	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh	1 Buku	2.834.869.086
4	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja	5 Kegiatan	1.081.688.300	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja	5 Kegiatan	1.503.353.000
5	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	WTP WTP/WDP	3.785.612.541.613	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	WTP WTP/WDP	3.693.687.356.321
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terlaksananya kegiatan untuk Pengembangan Sarana dan Prasarana Tersalurkannya bantuan keuangan khusus	100% 3 Jenis Laporan	3.785.612.541.613	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terlaksananya kegiatan untuk pengembangan sarana dan prasarana serta tersalurkannya bantuan keuangan khusus	3 Jenis Laporan	3.693.687.356.321

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Rasio nilai barang milik daerah yang clear & clean per total barang milik daerah	80%	10.723.017.539	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Rasio nilai barang milik daerah yang clear & clean per total barang milik daerah	80%	9.748.197.763	
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Rasio nilai barang milik daerah yang clear & clean per total barang milik daerah	80%	10.723.017.539	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Rasio nilai barang milik daerah yang clear & clean per total barang milik daerah	80%	9.748.197.763	
1	Penyusunan Standar Harga	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Daftar Standar Satuan Harga	1 kepgub	1.214.382.399	Penyusunan Standar Harga	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Daftar Standar Satuan Harga	1 kepgub	1.103.983.999	
2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Daftar Hasil telaahan dan pembahasan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 kepgub	371.833.155	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Daftar Hasil telaahan dan pembahasan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 kepgub	338.030.141	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Peningkatan kualitas SDM	1 laporan	1.785.229.135	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Peningkatan kualitas SDM	1 laporan	1.622.935.577	
4	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersedianya bukti kepemilikan BMA	1 laporan	3.900.854.102	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersedianya bukti kepemilikan BMA	1 laporan	3.546.231.002	
			Tersedianya Tanda Kepemilikan Tanah	1 laporan				Tersedianya Tanda Kepemilikan Tanah	1 laporan		
5	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	daftar hasil revaluasi barang milik aceh	1 kepgub BMA, 2 kegiatan	1.224.148.349	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya daftar hasil revaluasi barang milik aceh	1 kepgub BMA, 2 kegiatan	1.112.862.135	
6	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terlaksananya Hibah, Penjualan, Tukar menukar dan Penyertaan Modal	7 SK	2.226.570.400	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terlaksananya Hibah, Penjualan, Tukar menukar dan Penyertaan Modal	7 SK	2.024.154.909	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap total pendapatan Aceh	28%	19.062.138.053	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap total pendapatan Aceh	28%	21.129.216.412	
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap total pendapatan Aceh	28%	19.062.138.053	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap total pendapatan Aceh	28%	21.129.216.412	
1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	23 Kab/Kota	871.344.436	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terpenuhinya jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	23 Kab/Kota	1.292.131.305	
2	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Termutakhirnya basis data pajak dan retribusi Aceh	1200000 Basis Data	848.958.660	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Termutakhirnya basis data pajak dan retribusi Aceh	1200000 Basis Data	1.571.780.600	
3	Penagihan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terwujudnya Pelayanan Samsat Yang Prima	860000 Wajib Pajak	12.913.130.458	Penagihan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Terwujudnya Pelayanan Samsat Yang Prima	860000 Wajib Pajak	14.239.209.507	
4	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	pelatihan dan rapat koordinasi	4 Kegiatan	4.428.704.500	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	pelatihan dan rapat koordinasi	4 Kegiatan	4.026.095.000	

**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2022 merupakan rencana kerja tahunan dan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2022. Rencana Kerja BPKA disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan salah satu Organisasi Perangkat Aceh yang bertugas dalam bidang pengelolaan keuangan. Program dan kegiatan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh bukan usulan dari masyarakat, tetapi program dan kegiatan pada BPKA lebih bersifat pembinaan dan penyatuan visi bagi OPA lain serta kab/kota dalam pengelolaan keuangannya, sehingga program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tidak berasal dari usulan langsung masyarakat.



**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT ACEH**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai arahan RPJMN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, maka visi presiden tahun 2020-2024 adalah:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Berdasarkan lampiran 1 Perpres Nomor 18 Tahun 2020, telah ditetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Secara rinci sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU cipta lapangan kerja. Kedua, UU pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritas investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan dokumen Rancangan Awal RPJMA tahun 2017-2022, visi Kepala Daerah (KDH) adalah:

**“TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI  
PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI”**



## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

Upaya untuk mewujudkan visi ini ditempuh melalui 10 (SEPULUH) Misi Pembangunan dan 15 program Unggulan Pemerintah Aceh, yaitu:



M I S I	15 UNGGULAN
1: Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.	9 ACÈH PEUMULIA
2: Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dan budaya ke-Acehan.	11 ACÈH MEUADAB
3: Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki.	10 ACÈH DAMÉ
4: Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional.	3 ACÈH CARONG, 12 ACÈH TEUGA
5: Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi.	1 ACÈH SEUJAHTRA (JKA PLUS), 14 ACÈH SEUNINYA
6: Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.	5 ACÈH MEUGOË DAN MEULAÖT, 6 ACÈH TROË
7: Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan	4 ACÈH ENERGI
8: Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif.	7 ACÈH KREATIF, 8 ACÈH KAYA
9: Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip <i>Evidence Based Planning</i> yang efektif, efisien dan berkelanjutan	2 ACÈH SIAT
10: Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan	13 ACÈH GREEN, 15 ACÈH SEUMEUGOT, 14 ACÈH SEUNINYA

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Aceh Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang didalam RPJMA Tahun 2017-2022, maka Tema RKPA Tahun 2022 adalah: **”Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif”**. Unggulan Aceh Hebat yang terkait tema tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1) Aceh Meudadab, 2) Aceh Pemulia, 3) Aceh Seujahtra, 4) Aceh Kreatif, 5) Aceh Carong, 6) Aceh Teuga, 7) Aceh Meugoe dan Meulaot, 8) Aceh Kaya, dan 9). Aceh Dame. Disamping itu, untuk mendukung arah kebijakan Tahun 2022 RPJMA 2017-2022, maka Pemerintah Aceh menetapkan 4 (empat) Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Menumbuhkan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas;
3. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi dan Lingkungan Yang Berkelanjutan;
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keistimewaaan Aceh.

Melihat dari misi dan program unggulan yang telah ditetapkan Gubernur Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh ditugaskan mendukung dan mensukseskan misi ke 1 yakni **Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani** dengan program unggulannya **Aceh Peumulia**. Faktor pendukung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah tim kerja yang solid serta sudah diterapkannya manajemen yang rapi dan modern yang berbasis aplikasi teknologi informasi sehingga dapat menjamin transparansi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

9 (sembilan) agenda Prioritas Pembangunan Nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dikenal dengan NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh beriringan dengan prioritas yang tertuang dalam 9 prioritas pembangunan nasional yaitu pada point 2 (dua) membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur Pemerintah di Pusat dan di Daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai dan data kependudukan yang baik.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPA Tahun 2021, secara makro ekonomi Aceh dapat disimpulkan bahwa permasalahan pembangunan Aceh pada tahun 2022 masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu belum optimalnya pengelolaan asset dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan isu strategis Dana Otonomi Khusus

(OTSUS) masih memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Aceh dibandingkan dengan jenis penerimaan Aceh lainnya. Sebaliknya kontribusi Pendapatan Asli Aceh (PAA) masih tergolong kecil. Dengan kata lain, Pemerintah Aceh masih sangat tergantung pada penerimaan Dana Otsus dalam membiayai pembangunan Aceh. Dalam hal ini perlunya optimalisasi berbagai potensi sumber penerimaan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAA (dana cadangan BLUD, BUMA, imbal jasa perdagangan karbon, Investasi, ZISWAF). Kemandirian BLUD RSUZA diharapkan dapat dicapai pada tahun 2022 sehingga dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan PAA. Berbagai BUMA seperti: Bank Aceh dan PDPA perlu dievaluasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAA, serta mendorong pembentukan BUMA sektor produktif.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPA**

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Perumusan tujuan menjabarkan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Lebih dari itu, perumusan tujuan Strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan.

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tahun 2021 adalah:

- a. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat;
- b. Terpenuhinya kebutuhan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pengelolaan keuangan serta peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara;
- c. Pembentukan struktur organisasi BPKA yang lebih sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang diberikan;
- d. Melengkapi semua dasar-dasar pelaksanaan tugas dan fungsi seperti SOP dan Sisdur serta aturan lainnya yang diperlukan;
- e. Meningkatnya potensi Pendapatan Aceh baik dari sektor Pajak, Retribusi dan Pendapatan Aceh Lainnya;
- f. Meningkatnya kualitas laporan kinerja tahunan;
- g. Terwujudnya tertib administrasi bukti kepemilikan aset Pemerintah Aceh;
- h. Terwujudnya pengamanan aset secara administrasi dan fisik;
- i. Terselenggaranya tugas dan fungsi kedinasan serta pelayanan kepada masyarakat;
- j. Lahirnya aparatur sipil negara yang handal dalam pengelolaan keuangan;
- k. Terwujudnya kemandirian daerah;
- l. Terwujudnya Kualitas Layanan Publik.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Pemerintah Aceh Tahun 2022 dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mengusulkan program dan kegiatan tahun 2022 pada table 3.3.

TABEL 3.3  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023  
PROVINSI ACEH

SKPA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8=(7/6)*100	9	6	7
	URUSAN WAJIB								
5	UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN				4.554.676.261.016				5.079.227.748.820
5	02 KEUANGAN								
5	02 01 PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN YANG TERSUSUN TEPAT WAKTU (LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI, DLL DIBAGI DENGAN TOTAL LAPORAN WAJIB	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	100%	204.291.614.220	PAA	-	100%	239.106.341.170
5	02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	100%	2.146.272.750	PAA	-	100%	2.575.527.300
5	02 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, RTP, LAKIP	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	10 Dokumen	629.985.000	PAA	-	10 Dokumen	755.982.000
5	02 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA, DPA, RKA/DPA-P	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	10 Dokumen	1.516.287.750	PAA	-	10 Dokumen	1.819.545.300
5	02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	100%	96.541.219.058	PAA	-	100%	115.709.462.869
5	02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	24 Dokumen	94.712.947.689	PAA	-	24 Dokumen	113.655.537.226
5	02 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPA	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	5 Dokumen	921.392.825	PAA	-	5 Dokumen	1.105.671.390
5	02 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPA	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	5 Dokumen	906.878.544	PAA	-	5 Dokumen	948.254.253
5	02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	100%	2.562.240.000	PAA	-	100%	1.874.688.000
5	02 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Tertib Aset SKPA	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1Tahun	2.562.240.000	PAA	-	1Tahun	1.874.688.000

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

5	02	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	100%	2.493.561.085	PAA	-	100%	2.992.273.302	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Seragam Dinas bagi Aparatur Terpenuhinya Seragam Dinas bagi Aparatur	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	400 PNS dan 400 NON PNS	964.661.085	PAA	-	400 PNS dan 400 NON PNS	1.157.593.302
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya Bimtek bagi Aparatur	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	348 Orang	1.528.900.000	PAA	-	348 Orang	1.834.680.000
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	100%	27.276.587.679	PAA	-	100%	31.871.905.213	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Listrik	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Tahun	1.788.021.121	PAA	-	1 Tahun	2.945.625.345
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor BPKA	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Gedung	15.745.663.201	PAA	-	1 Gedung	18.894.795.841
				tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Samsat		Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	23 UPTD	PAA		-	23 UPTD		
				tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah dinas		Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	6 UPTD	PAA		-	6 UPTD		
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya ATK, Makan minum, Alat Kebersihan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	7 Bidang dan 1 tahun	4.426.675.329	PAA	-	7 Bidang dan 23 UPTD	4.612.010.394
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya bahan Cetakan kedinasan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	7 Bidang 23 UPTD	957.646.028	PAA	-	7 Bidang 23 UPTD	1.149.175.233
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Buku Bacaan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Tahun	45.000.000	PAA	-	1 Tahun	54.000.000
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Perjalanan Dinas	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Tahun	2.956.032.000	PAA	-	1 Tahun	3.067.238.400
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kearsipan Dinas menjadi tertib dan teratur	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Tahun	1.357.550.000	PAA	-	1 Tahun	1.149.060.000
5	02	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	100%	34.497.118.719	PAA	-	100%	40.922.670.462	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kendaraan untuk Operasional Kedinasan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	2 Unit	1.561.560.000	PAA	-	58 Unit	1.400.000.000
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Samsat, Rumah Dinas, Gedung Arsip Samsat	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	12 UPTD	32.935.558.719	PAA	-	23 UPTD	39.522.670.462
5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	100%	32.306.138.279	PAA	-	100%	33.732.144.826	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Surat Kedinasan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Tahun	400.000.000	PAA	-	1 Tahun	500.000.000
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan PDAM, Listrik, Telpn	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Tahun	7.366.861.140	PAA	-	1 Tahun	8.402.333.688
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Perlengkapan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Tahun	2.769.804.240	PAA	-	1 Tahun	2.123.765.088
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gaji Non ASN kantor induk dan UPTD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	23 UPTD	21.769.472.899	PAA	-	23 UPTD	22.706.046.050
5	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	100%	6.468.476.650	PAA	-	100%	9.427.669.198	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terjaganya kendaraan dinas, terlaksananya tugas-tugas perkantoran	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	250 Kendaraan	2.906.900.000	PAA	-	250 Kendaraan	3.588.280.000
				tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas		Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Tahun	PAA		-	1 Tahun		
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan gedung UPTD, dan Rumah Dinas	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 gudang	3.561.576.650	PAA	-	1 Tahun	5.839.389.198
				2 Gedung Induk				PAA		-	23 UPTD		
				23 UPTD				PAA		-			

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	WTP WTP/WDP	4.319.507.232.621	PAA	-	WTP WTP/WDP	4.807.203.221.821	
5	02	02	1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	WTP WTP/WDP	7.760.821.800	PAA	-	WTP WTP/WDP	12.912.986.289	
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	2 Dokumen	PAA	-	2 Dokumen	4.141.921.200	
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA PPAS-P	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	2 Dokumen	PAA	-	2 Dokumen	934.739.400	
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA/DPA SKPA	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	50 DPA & 50 DPPA	PAA	-	50 DPA & 50 DPPA	1.532.232.780	
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Dokumen Qanun APBA dan Penjabaran APBA	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Pergub 1 Qanun	PAA	-	1 Pergub 1 Qanun	4.458.000.000	
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Dokumen Qanun APBA-P dan Penjabaran APBA-P	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Qanun 2 Pergub	PAA	-	1 Qanun 2 Pergub	205.971.000	
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Dokumen Aturan terkait SBU, ASB, RKI, SE Penyusunan APBA	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 RanQanun 2 KepGub, 2 SE Gubernur, 3 PerGub	PAA	-	1 RanQanun	1.640.121.909	
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	WTP WTP/WDP	5.279.721.800	PAA	-	WTP WTP/WDP	8.028.708.214
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen hasil evaluasi gubernur penetapan APBK	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	23 kepgub	PAA	-	23 kepgub	2.360.541.410	
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen dokumen hasil evaluasi gubernur penetapan perubahan APBK	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	23 kepgub	PAA	-	23 kepgub	985.509.000	
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen dokumen hasil evaluasi gubernur penetapan Pertanggungjawaban APBK	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	23 kepgub	PAA	-	23 kepgub	1.598.550.900	
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Asistensi ke Kab/kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	95 orang	PAA	-	95 orang	1.143.046.800	
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Sosialisasi utk Kab/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	270 orang	PAA	-	270 orang	1.941.060.104	
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	WTP WTP/WDP	8.459.332.450	PAA	-	WTP WTP/WDP	8.457.393.513
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Penyelesaian Administrasi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	4 Jenis Laporan, 1800 SP2D dan SKPP	PAA	-	4 Jenis Laporan, 1800 SP2D dan SKPP	3.227.071.167	
					Terselesainya Administrasi Belanja Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	250 Register SP2D dan 40000 SP2D	PAA	-	250 Register SP2D dan 40000 SP2D			
					Terselesainya Administrasi Pengelolaan Kas Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1SK dan 250 Rekonsiliasi	PAA	-	1SK dan 250 Rekonsiliasi			
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terselesainya Administrasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	4 Laporan	PAA	-	4 Laporan	2.582.272.472	
					Tersusunnya Laporan Penerimaan Dana Desentralisasi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	6 Jenis Laporan	PAA	-	6 Jenis Laporan			
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	250 BKU	PAA	-	250 BKU	1.065.777.402	
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Terselesainya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan, Bendahara yang memiliki Sertifikat Bendahara, Peningkatan Pemahaman tentang Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	3 Draft Pergub/SE Gub dan 80 Draft SK PA/KPA	PAA	-	3 Draft Pergub/SE Gub dan 80 Draft SK PA/KPA	1.582.272.472	



## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

5	02	02	1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	WTP WTP/WDP	8.820.000.250	PAA	-	WTP WTP/WDP	8.616.777.484	
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA (LRA, Neraca, Arus Kas, LO, LPE, LPSAL dan CaLK)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Laporan	2.138.592.250	PAA	-	1 Laporan	2.658.801.088
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Akuntabel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Kegiatan	2.343.185.914	PAA	-	1 Kegiatan	3.265.261.809
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Buku	2.834.869.086	PAA	-	1 Buku	1.114.503.023
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	5 Kegiatan	1.503.353.000	PAA	-	5 Kegiatan	1.578.211.564
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	WTP WTP/WDP	3.693.687.356.321	PAA	-	WTP WTP/WDP	4.769.187.356.321
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya kegiatan untuk pengembangan sarana dan prasarana serta tersalurkannya bantuan keuangan khusus	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	3 Jenis Laporan	3.693.687.356.321	PAA	-	100%	4.769.187.356.321
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rasio nilai barang milik daerah yang clear & clean per total barang milik daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	80%	9.748.197.763	PAA	-	80%	11.697.837.257
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rasio nilai barang milik daerah yang clear & clean per total barang milik daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	80%	9.748.197.763	PAA	-	80%	11.697.837.257
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Daftar Standar Satuan Harga	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 kepgub	1.103.983.999	PAA	-	1 kepgub	1.324.780.795
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Daftar Hasil telaahan dan pembahasan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 kepgub	338.030.141	PAA	-	1 kepgub	405.636.145
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Peningkatan kualitas SDM	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 laporan	1.622.935.577	PAA	-	1 laporan	1.947.522.692
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya bukti kepemilikan BMA Tersedianya Tanda Kepemilikan Tanah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 laporan	3.546.231.002	PAA	-	1 laporan	4.255.477.200
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Tersusunnya daftar hasil revaluasi barang milik aceh	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 kepgub BMA 2 kegiatan	1.112.862.135	PAA	-	1 kepgub BMA 2 kegiatan	1.335.434.575
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Hibah, Penjualan, Tukar menukar dan Penyertaan Modal	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	7 SK	2.024.154.909	PAA	-	7 SK	2.428.985.850
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap total pendapatan Aceh	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	28%	21.129.216.412	PAA	-	28%	21.220.348.572
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap total pendapatan Aceh	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	28%	21.129.216.412	PAA	-	28%	21.220.348.572
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terpenuhinya jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	23 Kab/Kota	1.292.131.305	PAA	-	23 Kab/Kota	943.402.075
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Termutakhirnya basis data pajak dan retribusi Aceh	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1200000 Basis Data	1.571.780.600	PAA	-	1200000 Basis Data	953.806.993
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Terwujudnya Pelayanan Samsat Yang Prima	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	860000 Wajib Pajak	14.239.209.507	PAA	-	860000 Wajib Pajak	15.687.051.409
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	pelatihan dan rapat koordinasi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	4 Kegiatan	4.026.095.000	PAA	-	4 Kegiatan	3.636.088.095

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2022. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2022 terdapat 4 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2022 :

Dengan ditetapkannya tujuan, strategis dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah rencana program kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan yang pendanaannya bersumber dari Pendapatan Asli Aceh, Dana Alokasi Umum dan sumber-sumber lainnya yang merupakan bagian dari Pendapatan Aceh. Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dapat dilihat pada tabel 4.1.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH  
PROVINSI ACEH

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4
1					Urusan Wajib		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		3.959.176.261.016
5	02				KEUANGAN		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN YANG TERSUSUN TEPAT WAKTU (LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI, DLL DIBAGI DENGAN TOTAL LAPORAN WAJIB	204.291.614.220
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	2.146.272.750
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, RTP, LAKIP	629.985.000
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA, DPA, RKA/DPA-P	1.516.287.750

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	96.541.219.058
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	94.712.947.689
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPA	921.392.825
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPA	906.878.544
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.562.240.000
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Tertib Aset SKPA	2.562.240.000
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	2.493.561.085
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Seragam Dinas bagi Aparatur Terpenuhinya Seragam Dinas bagi Aparatur	964.661.085
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya Bimtek bagi Aparatur	1.528.900.000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	27.276.587.679
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Listrik	1.788.021.121
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor BPKA tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Samsat tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah dinas	15.745.663.201
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya ATK, Makan minum, Alat Kebersihan	4.426.675.329
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya bahan Cetakan kedinasan	957.646.028
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Buku Bacaan	45.000.000
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Perjalanan Dinas	2.956.032.000
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kearsipan Dinas menjadi tertib dan teratur	1.357.550.000
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	34.497.118.719
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kendaraan untuk Operasional Kedinasan	1.561.560.000
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Samsat, Rumah Dinas, Gedung Arsip Samsat	32.935.558.719

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	32.306.138.279
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Surat Kedinasan	400.000.000
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan PDAM, Listrik, Telpon	7.366.861.140
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Perlengkapan	2.769.804.240
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gaji Non ASN kantor induk dan UPTD	21.769.472.899
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.468.476.650
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terjaganya kendaraan dinas, terlaksananya tugas-tugas perkantoran	2.906.900.000
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan gedung UPTD, dan Rumah Dinas	3.561.576.650
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	4.319.507.232.621
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	7.760.821.800
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	2.351.601.000
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA PPAS-P	578.949.500
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA/DPA SKPA	976.860.600
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Dokumen Qanun APBA dan Penjabaran APBA	1.815.000.000
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Dokumen Qanun APBA-P dan Penjabaran APBA-P	171.642.500
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Dokumen Aturan terkait SBU, ASB, RKI, SE Penyusunan APBA	1.866.768.200
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	5.279.721.800
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen hasil evaluasi gubernur penetapan APBK	1.467.117.800
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen dokumen hasil evaluasi gubernur penetapan perubahan APBK	821.257.500
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen dokumen hasil evaluasi gubernur penetapan Pertanggungjawaban APBK	821.257.500
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Asistensi ke Kab/kota	952.539.000
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Sosialisasi utk Kab/Kota	1.217.550.000
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	8.459.332.450
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Penyelesaian Administrasi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah Terselesaikannya Administrasi Belanja Daerah Terselesaikannya Administrasi Pengelolaan Kas Daerah	2.822.559.300
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terselesaikannya Administrasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tersusunnya Laporan Penerimaan Dana Desentralisasi	1.751.893.700
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	1.905.481.450
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Terselesaikannya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan, Bendahara yang memiliki Sertifikat Bendahara, Peningkatan Pemahaman tentang Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1.979.398.000

## RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	8.820.000.250
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA (LRA, Neraca, Arus Kas, LO, LPE, LPSAL dan CaLK)	2.138.592.250
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Akuntabel	2.343.185.914
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh	2.834.869.086
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja	1.503.353.000
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	3.693.687.356.321
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya kegiatan untuk pengembangan sarana dan prasarana serta tersalurkannya bantuan keuangan khusus	3.693.687.356.321
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rasio nilai barang milik daerah yang clear & clean per total barang milik daerah	9.748.197.763
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rasio nilai barang milik daerah yang clear & clean per total barang milik daerah	9.748.197.763
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Daftar Standar Satuan Harga	1.103.983.999
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Daftar Hasil telaahan dan pembahasan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	338.030.141
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Peningkatan kualitas SDM	1.622.935.577
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya bukti kepemilikan BMA Tersedianya Tanda Kepemilikan Tanah	3.546.231.002
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Tersusunnya daftar hasil revaluasi barang milik aceh	1.112.862.135
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Hibah, Penjualan, Tukar menukar dan Penyertaan Modal	2.024.154.909
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap total pendapatan Aceh	21.129.216.412
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap total pendapatan Aceh	21.129.216.412
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terpenuhinya jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1.292.131.305
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Termutakhirnya basis data pajak dan retribusi Aceh	1.571.780.600
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Terwujudnya Pelayanan Samsat Yang Prima	14.239.209.507
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	pelatihan dan rapat koordinasi	4.026.095.000

**BAB V**

**PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2022 ini mengacu kepada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Renja BPKA merupakan dokumen perencanaan yang bersifat tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan tahunan yang telah disusun melalui proses yang panjang dengan tujuan tercapainya target-target yang telah ditentukan, diharapkan penyusunan dokumen KUA-PPAS, RKA dan DPA mengacu dan berpedoman pada Renja ini, juga diharapkan segala kendala dan tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik dan peluang yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan BPKA dalam Renja Tahun 2022 bertujuan sebagai panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi BPKA dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, dan juga memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Renja ini juga bertujuan untuk dapat mewujudkan sinergitas antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Demi merealisasikan semua target yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada BPKA, maka dalam renja tahun anggaran 2021 BPKA merencanakan 4 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan.

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan perlu dilakukan pengalokasian sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai, serta BPKA akan terus meningkatkan kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dengan adanya Renja BPKA, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi gubernur diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja (RENJA) BPKA Tahun 2022, dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk melaksanakan kegiatan Tahun 2022 yang akan datang.

Kami menyadari penyusunan dan penyajian Renja BPKA Tahun 2022 ini masih belum mencapai kesempurnaan, namun sangat diharapkan Renja Tahun 2022 ini dapat memberi manfaat bagi para pengambil kebijakan (*Stake-Holders*) demi terwujudnya pembangunan Aceh secara menyeluruh dan terintegrasi.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan visi, misi serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang akan datang.

Banda Aceh, Juli 2021  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

**AZHARI, SE, M.Si**  
NIP. 1963032519891003